

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
INVESTASI DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2014-2021**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

MUDRIK SYAHRULLAH

NIM 1805026028

PRODI SI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBIG

Lamp : 4 eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mudrik Syahrullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mudrik Syahrullah

NIM : 1805026028

Prodi : Ekonomi Islam

Judul : **Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022.

Pembimbing I



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt

NIP: 19800128 200801 1 010

Pembimbing II



Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.Si.

NIP: 198607312019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Mudrik Syahrullah

NIM : 1805026028

Prodi : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *Cumlode* pada tanggal 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dwi Swasana Ramadhan, S.E., M.SEL.

NIP. 199403032019031014

Sekretaris Sidang

Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.SI.

NIP: 198607312019031008

Penguji Utama I

Riska Wjiyanti, S.H., M.H.

NIP. 199304082019032019

Penguji Utama II

Nurudin, S.E., M.M.

NIP. 199005232015031004

Pembimbing I

Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt

NIP: 19800128 200801 1 010

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.Si.

NIP: 198607312019031008



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قُلْ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Qs. Al-Baqarah ayat 286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Qs Al-Insyirah ayat 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam wujud syukur penulis, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suhardi dan Ibu Musriyati. Terima kasih selalu memberikan semangat, kasih sayang, doa serta dukungan moral maupun materil yang begitu besar kepada penulis. Semoga Allah berikan Syurga sebagai balasannya.
2. Untuk kakak saya, Nihayatul Hikmah, Nurul Atqiya', dan Lailatul Mabruyah yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
3. Untuk keponakanku tersayang yang selalu mendukungku dan memberi semangat untuk menyelesaikan tugas skripsiku.
4. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
5. Sahabat-sahabat EI A angkatan 18 yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
6. Almamaterku tercinta, UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim, dengan kerendahan hati, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyampaikan skripsi dengan judul, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021”, merupakan hasil penelitian dan gagasan murni penulis yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, atau mengambil gagasan atau materi yang dipublikasikan oleh orang lain. Demikian pula, dengan informasi dan sumber yang didapatkan berdasarkan penelitian, kecuali beberapa rujukan yang dapat dijadikan referensi untuk mendukung penyusunan skripsi ini.

Semarang, 13 Juni 2022

Deklarator



Mudrik Syahrullah

1805026028

TRANSLITERASI

Buku panduan transliterasi bahasa Arab-Latin ini sangat diperlukan agar pembaca mudah dalam membaca karena ada beberapa istilah yang ditulis dalam bahasa Arab dalam penelitian ini. Pedoman Transliterasi Arab Latin didasarkan pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1987. Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar huruf Arab dan transliterasinya yang ditulis dalam huruf latin.

ء= ,	ز= z	ق= q
ب= b	س= s	ك= k
ت= t	ش= sy	ل= l
ث= ts	ص= sh	م= m
ج= j	ض= dl	ن= n
ح= h	ط= th	و= w
خ= kh	ظ= zh	ه= h
د= d	ع= ,	ي= y
ذ= dz	غ= gh	
ر= r	ف= f	

B. Vokal Tunggal (Monoftong)

َ = A

ِ = I

ُ = U

C. Vokal Rangkap (Diftong)

اي = AY

او = AW

D. Syaddah (-)

Tasydid atau Syahadah dilambangkan dengan pengulangan huruf konsonan ganda. Seperti: الطَّبّ *Al-Thib*.

E. Kata Sandang (...ال)

Huruf sandang (...ال) yang dibaca al, ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh: = الصناعة *al-shina'ah*

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber perolehan pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas di Pulau Jawa, namun merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan asli daerah terendah dibandingkan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola potensi PAD yang ada. Untuk memperoleh informasi mengenai penyebab potensi PAD dibutuhkan pengetahuan untuk menganalisis perkembangan beberapa indikator ekonomi makro seperti PDRB, investasi dan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh PDRB, investasi dan inflasi terhadap PAD di Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder selama periode pengamatan dari tahun 2014 hingga 2021. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Setelah itu, data akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan dari hasil analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana kenaikan PDRB akan berdampak terhadap pendapatan perkapita masyarakat daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil pajak dan retribusi daerah sebab kemampuan masyarakatnya. Selanjutnya variabel Investasi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, hal tersebut dikarenakan investasi di Provinsi Jawa Tengah merupakan investasi padat modal, dan kurangnya investasi di dalam sarana produksi. Selain itu, secara parsial variabel Inflasi juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, karena masyarakat akan tetap membayar pajak daerah, meskipun pendapatan masyarakat berkurang dikarenakan pajak daerah bersifat memaksa. Sedangkan secara simultan variabel PDRB, Investasi, dan tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 30%.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi

ABSTRACT

Based on Law No. 32 of 2004, the source of revenue for the region comes from regional taxes, regional levies, separated regional assets, and other legitimate income. Central Java has a large area on the island of Java, but is one of the provinces with the lowest local revenue compared to DKI Jakarta, West Java and East Java. This shows that the local government has not been optimal in managing the existing PAD potential. To obtain information about the potential causes of PAD, knowledge is needed to analyze the development of several macroeconomic indicators such as GRDP, investment and inflation. This study aims to determine partially or simultaneously the effect of GDP, investment and inflation on PAD in Central Java.

This research is a quantitative study using secondary data during the observation period from 2014 to 2021. The data collection method used in this study is documentation using a saturated sampling technique or census. After that, the data will be analyzed using multiple linear regression analysis.

Overall, the authors conclude from the results of multiple linear regression analysis and hypothesis testing that the GRDP variable has a significant effect on regional original income, where an increase in GRDP will have an impact on the per capita income of local people, which in turn will increase the results of regional taxes and retributions due to the ability of the people. Furthermore, the investment variable partially does not have a significant effect on PAD, this is because investment in Central Java Province is a capital-intensive investment, and the lack of investment in production facilities. In addition, partially the inflation variable does not have a significant effect on PAD, because people will continue to pay local taxes, even though people's incomes are reduced because local taxes are coercive. Meanwhile, simultaneously, the variables of GDP, investment, and the inflation rate have a significant effect on local revenue by 30%.

Keywords: Regional Original Income, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, and Inflation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021”**.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. terutama yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr.H Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, S.E., MM selaku Sekretaris Jurusan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Terkhusus Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.Si.I, selaku pembimbing II yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya dosen Jurusan Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, ucapan terima kasih atas motivasi dan ilmunya. Dan kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terima kasih sudah membantu apa yang penulis butuhkan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan kalian semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis

Mudrik Syahrullah

1805026028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	xix
1.2. Rumusan Masalah.....	xxv
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	xxv
1.4. Sistematika Penulisan	xxvi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	1
2.1.2. Komponen Pendapatan Asli Daerah	1
2.1.3. Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.4. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah dalam Prespektif Ekonomi Islam	8
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	11
2.2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	11
2.2.2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi).....	12
2.2.3. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto	13

2.2.4.	Fungsi Adanya Data Produk Domestik Regional Bruto	16
2.2.5.	Produk Domestik Regional Bruto dalam Prespektif Ekonomi Islam	16
2.3.	Investasi	17
2.3.1.	Pengertian Investasi	17
2.3.2.	Teori Investasi.....	18
2.3.3.	Macam-Macam Penanaman Modal	19
2.3.4.	Prosedur Penanaman Modal di Jawa Tengah	22
2.3.5.	Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam.....	23
2.4.	Inflasi	24
2.4.1.	Pengertian dan Teori Inflasi.....	24
2.4.2.	Jenis-Jenis Inflasi	26
2.4.3.	Pengukuran Inflasi	27
2.4.4.	Pengukuran Inflasi di Indonesia.....	28
2.4.5.	Dampak Inflasi.....	30
2.4.6.	Pengendalian Inflasi.....	31
2.4.7.	Inflasi dalam Prespektif Ekonomi Islam.....	31
2.5.	Penelitian Terdahulu	33
2.6.	Kerangka Pemikiran Teoritik.....	36
2.7.	Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2.	Populasi dan Sampel	39
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
3.5.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2.	Penyajian Data	47
4.2.1.	Pendapatan Asli Daerah	47
4.2.2.	Produk Domestik Regional Bruto	49
4.2.3.	Investasi.....	51
4.2.4.	Inflasi.....	52

4.3. Analisis Data.....	54
4.3.1. Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.1.1.Uji Normalitas.....	54
4.3.1.2.Uji Multikolinearitas.....	56
4.3.1.3.Uji Autokorelasi.....	57
4.3.1.4.Uji Heteroskedasitas.....	58
4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.3.3. Uji Hipotesis.....	62
4.3.3.1.Analisis Determinasi (R^2).....	62
4.3.3.2.Uji Koefisien Regresi (Uji F).....	62
4.3.3.3.Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	63
4.4. Interpretasi dan Pembahasan.....	64
4.4.1. Pengaruh PDRB Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.....	65
4.4.2. Pengaruh Investasi Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.....	65
4.4.3. Pengaruh Inflasi Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.....	67
4.4.4. Pengaruh PDRB, Investasi dan Inflasi Terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.....	68
BAB V Penutup	
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah (dalam jutaan rupiah) Tahun 2014-2021.....	xx
Tabel 1.2 :Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa (dalam jutaan rupiah) Tahun 2014-2021	xxi
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam triliun rupiah) Tahun 2014-2021	48
Tabel 4.2 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam triliun rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021	50
Tabel 4.3 : Realisasi Investasi (dalam triliun rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021	51
Tabel 4.4 : Tingkat Inflasi (%) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2021	53
Tabel 4.5 : Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	56
Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.7 : Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.8 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.9 : Hasil Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4.10 : Hasil Uji Determinasi (R^2).....	62
Tabel 4.11 : Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji F)	63
Tabel 4.12 : Hasil Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah	35
Gambar 4.1 : Hasil Uji Normal Probability Plot.....	55
Gambar 4.2 : Hasil Uji Scatterplots	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Riwayat Hidup.....	76
Lampiran 2 : Distribusi Nilai F Tabel dengan Taraf Signifikansi 0,05 %	77
Lampiran 3 : Distribusi Nilai F Tabel.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan terhadap masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintahan daerah dapat mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. karena kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pemerintahan daerahnya, sehingga pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya.

Pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan daerahnya, sehingga memungkinkan pemerintah mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah terkonsentrasi pada wilayah kabupaten dan kota, dengan pemberian kewenangan pembiayaan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Peningkatan pendapatan daerah akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah PAD maka semakin tinggi pula besaran APBD dari sisi pendapatan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan pembangunan.

Tabel 1.1

Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah (dalam jutaan rupiah) Tahun 2014-2021

Tahun	Jenis Penerimaan				Kontribusi PAD (%)
	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang sah	Total Pendapatan	
2014	9.916.358	2.542.626	2.698.475	15.157.460	65.4%
2015	10.904.825	2.257.142	3.666.185	16.828.153	64,8%
2016	11.541.029	8.017.297	74.249	19.632.577	58.7%
2017	12.547.513	11.067.786	87.874	23.703.174	52.9%
2018	13.711.836	10.933.776	56.705	24.702.318	55.5%
2019	14.437.914	11.334.903	86.962	25.859.780	55.8%
2020	13.668.282	11.632.787	92.666	25.393.735	53.8%
2021	14.975.030	11.652.358	136.362	26.763.751	55.9%

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan tabel 1.1 kita dapat melihat bahwa delapan tahun terakhir PAD Jawa Tengah memiliki kontribusi rata-rata sekitar 57,85% terhadap pendapatan daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) suatu daerah jika memiliki tingkat kemandirian (>50-75%) dikategorikan sedang, artinya daerah tersebut sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerahnya, hal ini sejalan dengan hasil review atas kemandirian fiskal pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, menggunakan metode *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977), menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,6542 pada tahun 2014, 0,6480 pada tahun 2015, 0,5879 pada tahun 2016, 0,5294 pada tahun 2017, 0,5551 pada tahun 2018, pada tahun 2019 sebesar 0.5583, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0.5382 dan 0.5595 pada tahun 2021 sehingga dapat dikategorikan mandiri ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$).¹ Namun PAD Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi di Pulau Jawa cukup rendah.

¹ Agung Firman Sampurna, Pius Lustrilanang, and Bahrullah Akbar, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 & Laporan Hasil Reviue Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019* (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Tabel 1. 2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Pulau Jawa (dalam jutaan rupiah) Tahun 2014-2021

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	Banten	DIY
2014	31.274.215	15.038.153	14.442.216	9.916.315	4.899.125	1.464.604
2015	33.686.176	16.032.856	15.402.647	10.904.881	4.972.737	1.593.110
2016	36.888.017	17.042.895	15.817.795	11.541.029	5.463.156	1.673.749
2017	43.901.488	18.081.123	17.324.177	12.547.513	5.756.371	1.851.977
2018	43.327.136	19.64. 915	18.53. 062	13.711.836	6.329.138	2.041.096
2019	45.707.400	21.244.266	19.327.125	14.437.914	7.022.309	2.082.795
2020	37.414.754	18.521.882	17.953.528	13.668.282	5.906.535	1.876.706
2021	51.891.120	25.066.632	16.277.054	14.975.030	7.246.729	1.849.837

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Pada Tabel 1.2, dapat kita lihat bahwa pendapatan asli daerah Pulau Jawa terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2020 total pendapatan asli daerah pulau Jawa mengalami penurunan. DKI Jakarta memiliki pendapatan asli daerah tertinggi, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta. Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta adalah tiga provinsi dengan PAD terendah di Provinsi Pulau Jawa, namun Banten dan DI Yogyakarta tidak cukup besar dibandingkan dengan Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas di Pulau Jawa, namun merupakan salah satu Provinsi dengan pendapatan asli daerah yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah mempunyai 29 Kabupaten dan 6 Kota, dibandingkan Jawa Barat yang hanya mempunyai 18 Kabupaten dan 9 Kota. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah, dan perlu untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya.² Salah satu masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah tingginya ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal yang tinggi mengakibatkan kemampuan daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya menjadi terbatas.

² Ririn Bella Silvia, "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah" (Universitas Negeri Semarang, 2019).

Perekonomian daerah terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) dan juga sebagai indikator untuk melihat situasi ekonomi daerah selama periode waktu tertentu. Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan, sehingga jumlah PDRB setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan faktor produksi setiap wilayah.³ Selama delapan tahun terakhir nilai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 PDRB Jawa Tengah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Hal ini sering dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Jawa Tengah, sehingga beberapa lapangan usaha mengalami penurunan produksi. Peran terpenting dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah dihasilkan oleh industri pengolahan yang menyumbang sekitar 34% dari PDRB. Sementara itu, pada tahun 2021 PDRB Jawa Tengah kembali mengalami pertumbuhan positif. Hal ini bisa terjadi karena semua sektor mengalami pertumbuhan yang baik, selain sektor jasa keuangan yang minus 2,5%.

Produk Domestik Regional Bruto diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri pada satu tahun tertentu. Barang dan jasa ini diproduksi tidak hanya oleh perusahaan yang dimiliki oleh penduduk Negara tersebut, tetapi juga oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Konsep makro menyimpulkan bahwa semakin tinggi produk domestik bruto, maka semakin tinggi pula potensi penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.⁴

Gufon Reynaldin Sunandar (2017), menyatakan bahwa PDRB dengan PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Artinya semakin besar PDRB yang diterima, maka semakin besar pula PAD yang diterima oleh suatu daerah. Selain itu, Hernawati (2019) juga mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Lestari, Suharno, dan Djoko Kristianto (2017), bahwa ada pengaruh yang negatif dan signifikan PDRB terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten/kota di Jawa Tengah.

³ Grevy Rahmawati Sukamto, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Jumlah Penduduk Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa Tahun 2013)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

⁴ Evi Adriani and Sri Indah Handayani, "Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Kabupaten Merangin," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 08 (2008): 1–6.

Salah satu kewenangan daerah adalah pengelolaan investasi atau penanaman modal. Penyertaan modal merupakan bagian terpenting dari investasi daerah jangka panjang. Investasi merupakan bagian penting yang dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Skala investasi akan mempengaruhi perekonomian sebuah daerah. Perkembangan suatu sektor ekonomi tidak lepas dari nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan secara berturut-turut akan mendorong proses ekonomi.⁵ Perkembangan realisasi investasi PMA-PMDN di Jawa Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2021) terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2019, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 realisasi investasi di Jawa Tengah sebesar Rp18,59 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp59,50 triliun, namun menurun menjadi 50,24 triliun pada tahun 2020. Walaupun tahun 2021 pandemi covid-19 masih menjadi penghambat jalannya investasi yang masuk, dikarenakan adanya sejumlah pembatasan terutama untuk PMA, namun realisasi investasi Jawa Tengah naik sebesar 4,6% dari tahun 2020. Jika dilihat dari pertumbuhannya, investasi di Jawa Tengah berfluktuasi dari tahun ke tahun.⁶

Investasi yang terjadi di daerah berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang public. Sedangkan investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya daya beli masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johana Rosmalia (2014), menyebutkan bahwa variabel Investasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Nova Anggraini (2014). Akan tetapi Muhammad Sirojul Munir (2021), menyimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus.

Dengan meningkatnya aktivitas penduduk Provinsi Jawa Tengah maka akan menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang berlebihan akan memicu terjadinya inflasi. Oleh karena itu, inflasi akan memicu keadaan ekonomi yang buruk jika tidak ada pengendalian yang dilakukan. Tingkat aman inflasi adalah dibawah 10% dan ketika melebihi 25% akan memicu terjadinya kenaikan harga

⁵ Metriana Jovanika Hayu Wuranti, Diana Dwi Susanti, *Analisis ICOR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020* (Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021).

⁶ Diah Retnowati and Harsuti, "Statistik Realisasi Investasi Di Jawa Tengah" (2017): 608–618.

barang dan jasa, selain itu juga akan mengakibatkan penurunan nilai tukar rupiah.⁷ Melihat fenomena yang ada, tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 8,22 %, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 2,73%, 2,36% pada tahun 2016, lalu pada tahun 2017 naik sebesar 3,71% setelah itu mulai tahun 2018-2020 inflasi mengalami penurunan. Pada tahun 2020 inflasi Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada angka 1,56%. Hal tersebut mencerminkan penurunan permintaan konsumsi masyarakat. Dimana sejalan dengan kelesuan perekonomian pada masa pandemic covid-19. Terutama berlangsung pada komoditas kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bakar lainnya, serta kelompok transportasi. Sedangkan pada tahun 2021 inflasi kembali naik sebesar 1,70% hal tersebut dipicu oleh kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, angkutan udara, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa, Jawa Tengah mencatat inflasi tahunan terendah kedua, setelah Provinsi Jawa Timur.⁸

Menurut Boediono, inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga barang satu atau dua saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.⁹ Inflasi dapat mengindikasikan melemahnya daya beli yang diikuti dengan penurunan nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Semakin tinggi tingkat inflasi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin melemah. Angka inflasi memiliki hubungan atau pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika nilai inflasi tinggi memang akan menurunkan kemampuan/daya beli masyarakat, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat secara umum dan terus menerus. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mengakibatkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah.¹⁰ Di sisi lain, inflasi juga memiliki efek yang sebaliknya. Dengan naiknya harga-harga barang atau jasa, akan ada beberapa kelompok

⁷ Ariska Oktiani, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 16–35.

⁸ Muh. Fahrurrizki Aulia Anton Kisworo, Christian Octavian, Deded T. Prima, *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah*, ed. Wulan Agustina Rahayu, *Bank Indonesia* (Semarang: BI Provinsi Jawa Tengah, 2021), www.bi.go.id.

⁹ Siti Nurul Afyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 5, no. 2 (2011): 52–59.

¹⁰ Dian Ramdani, Darmansyah, and Nurmala Ahmar, "Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 04, no. 01 (2021): 27–39.

individu yang akan menekan konsumsi mereka baik kebutuhan primer, terutama untuk kebutuhan sekunder dan tersier.¹¹

Dimas Priyono (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah. Namun berbeda dengan apa yang diungkapkan Ariska Oktiani (2021) bahwa inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan bernilai negatif.

Merujuk latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap PAD, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 secara simultan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 secara simultan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai permasalahan apakah produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi

¹¹ Caesar Muslim, Syahrir Mallongi, and Zainuddin Rahman, “Pengaruh PDRB , Jumlah Penduduk Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari,” *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia* 2, no. 3 (2019): 57–65.

berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2021.

2. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

b. Secara praktis

1. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga dapat membiayai pembangunan ekonomi daerah secara mandiri dan tetap mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

2. Bagi masyarakat, memperoleh informasi terkait pengaruh produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang menjelaskan diskripsi tentang teori keagenan, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional , dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengemukakan tentang deskripsi data penelitian, uji validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran/rekomendasi, penutup yang didapatkan dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh menurut Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang dapat menjadi sumber penerimaan harus perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sejumlah beban belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan, sehingga kemandirian otonomi dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah guna membiayai semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan merata, komponen tersebut berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.¹²

2.1.2. Komponen Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan asli daerah diatur dalam Undang-undang Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, komponen PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.¹³ Berikut uraian masing-masing komponen pendapatan asli daerah :

1. Pajak Daerah

a. Pengertian dan Jenis Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didalamnya mengatakan bahwa Pajak Daerah dapat berupa iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak memperoleh

¹² Dedek Hasanur, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh)" (Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2016).

¹³ Rudi Prasetyo and Sutjipto Ngumar, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 3 (2017): 854–869.

imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk tujuan daerah bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan tingkatan pemerintah daerah, meliputi pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus bagi daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, namun tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabuapten/kota.¹⁵

b. Tarif Pajak Daerah

Menurut Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pajak Daerah, memutuskan besaran tarif pajak Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- Pajak untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi sebesar 1,5 %.
- Pajak bagi kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1,0 %.
- Pajak bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, Intansi Pemerintah, lembaga sosial dan keagamaan, sebesar 0,5 %.
- Pajak bagi kendaraan bermotor alat-alat besar dan berat sebesar 0,2 %.

¹⁴ Dina Anggraeni, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1274/1/DINA_ANGGRAENI-FEB.PDF.

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, 2019th ed. (Yogyakarta: Andi, 2019).

¹⁶ Silvia, "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah."

- b) Tarif Pajak bagi kepemilikan kedua dan seterusnya untuk kendaraan Bermotor pribadi roda 2, 200 cc ke atas serta roda 4 dikenai tarif secara progresif, sebagai berikut:
- Kepemilikan kedua dikenai pajak 2 %.
 - Kepemilikan ketiga dikenai pajak 2,5 %.
 - Kepemilikan keempat dikenai pajak 3 %.
 - Kepemilikan kelima dan seterusnya dikenai pajak 3,5 %.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- a) Tarif pajak BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
- 12,5 %, untuk penyerahan pertama.
 - 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
- b) Khusus bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar yang tidak memakai jalan umum, maka tarif pajak yang ditetapkan sebagai berikut :
- 0,75 % bagi penyerahan pertama.
 - 0,075% bagi penyerahan kedua dan seterusnya.
- 3) Tarif pajak 5% ditetapkan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
- 4) Tarif Pajak Permukaan (PAP) ditetapkan sebesar 10%.
- 5) Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, karena terjadinya hubungan antara balas jasa yang diterima secara langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan menurut Undang Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau badan.¹⁷

Berbeda halnya dengan pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

¹⁷ Cantika Bella, "Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 4 (2014): 747–752.

Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk membiayai aktifitas yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

a. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis sebagai berikut :¹⁸

- 1) Retribusi jasa umum, merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk keperluan dan kemanfaatan umum serta bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 2) Retribusi jasa usaha, merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh PEMDA dengan mengikuti prinsip komersial karena pada prinsipnya bisa disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas: Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Penyeberangan di Air.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi atas aktifitas PEMDA dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan: pembinaan, pengendalian, pengaturan, serta pengawasan terhadap kegiatan penggunaan ruang, pemanfaatan sumber daya alam,

¹⁸ Beta Asteria, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen 2*, no. 1 (2015): 51–61.

barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi kepentingan umum. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Usaha Perikanan serta Retribusi Izin Trayek.

b. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan melihat kemampuan masyarakat, biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, prinsip keadilan, serta efektifitas pengendalian terhadap pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal dan biaya bunga. Sedangkan retribusi jasa usaha ditetapkan dengan melihat tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Kemudian tarif retribusi perizinan tertentu diperlukan untuk menggati sebagian atau semua biaya pelaksanaan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi penerbitan dokumen perizinan, pemeriksaan dilapangan, penatausahaan, serta biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.¹⁹ Penetapan tarif retribusi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi daerah provinsi jawa tengah.

Retribusi daerah dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kupon, karcis, dan kartu langganan. Jika Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat waktu atau kurang dalam pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga senilai 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut UU No. 28 tahun 2009 merupakan hasil yang didapat dari pengelolaan kekayaan yang

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*.

terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat dimasukkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.²⁰

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut UU No. 5 Tahun 1974 BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Pasar) dan di bidang lainnya, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Secara umum pendirian badan usaha milik daerah (BUMD), bertujuan untuk memperluas pendapatan daerah, meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan perekonomian daerah.²¹
- 2) Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif besar, maka daerah diberikan sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004. Pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tjahya Supriatna menyebutkan bahwa hasil perusahaan daerah terdiri dari :²²

- 1) Untuk perusahaan daerah yang seluruh modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (tanpa modal dari luar), hasil usaha daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰ Makdalena Asmuruf, Vikie Rimate, and George Kawung, "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015): 732.

²¹ Hibzon, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2007): 106–116.

²² Hernawati, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

- 2) Untuk perusahaan daerah yang sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (dengan tambahan modal dari luar), hasil perusahaan daerah tersebut bersifat dana pembangunan dan sedikit untuk APBD yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek pendapatan jenis meliputi: Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Penerimaan komisi; Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; Pendapatan bunga; potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah; Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan eksekusi atas jaminan; Pendapatan denda retribusi; Pendapatan dari pengembalian; Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan Fasilitas sosial dan umum; Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.²³

2.1.3 Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya pendapatan asli daerah.²⁴

1. Pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi dan belum maksimal dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya.
2. Masih kurangnya keterlibatan perusahaan-perusahaan milik daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD.
3. Terlalu mementingkan sektor perpajakan, padahal semua jenis pajak primer yang paling produktif, baik itu pajak langsung maupun tidak langsung di ambil oleh pusat. Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan bermotor (PKB).
4. Meskipun dengan bervariasinya pajak daerah, namun tidak semua pajak daerah dapat meningkatkan PAD.

²³ Anim Rahmayati and Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 2 (2018): 111–120.

²⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan 1. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

5. Masih kecilnya pemerintah pusat dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.
6. Belum banyaknya keuntungan yang diberikan Badan usaha milik daerah (BUMD) kepada Pemerintah Daerah.
7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.
8. Cukup rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
9. Peraturan daerah yang kurang efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

2.1.4. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan daerah dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut .²⁵

1. *Intensifikasi*, yaitu dengan cara peremajaan pendapatan objek dan subjek pajak serta retribusi daerah. Mengkaji kembali pajak daerah yang dipotong guna mencari kemungkinan untuk diubah menjadi retribusi daerah. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai. Serta mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (*ekstensifikasi*), yaitu upaya observasi sumber-sumber penerimaan yang ditujukan terhadap penggunaan potensi daerah yang memberikan keuntungan lebih secara ekonomis terhadap masyarakat. Dimana observasi sumber-sumber pendapatan daerah dilakukan untuk menekan beban pengeluaran dan memajukan aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian, upaya *ekstensifikasi* merujuk pada upaya untuk menggali potensi daerah yang nantinya bisa digunakan secara konsisten.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan guna menarik masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik merupakan hak yang selayaknya didapat oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian kembali mengenai cara yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Masyarakat dan Pemerintah pada prinsipnya merupakan dua institusi yang mempunyai fungsi dasar yang sama, yaitu untuk mewujudkan semua kewajiban kolektif dan publik dalam mewujudkan *falah*. Islam telah mengklasifikasikan

²⁵ Muhammad Sirojul Munir, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019)" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).

sektor-sektor penerimaan Negara atau pemerintah menjadi dua yaitu yang bersifat rutin dan temporer. Penerimaan Negara yang bersifat rutin seperti: *zakat, kharaj, jizyah, ushr, infak* dan *shadaqah* serta pajak jika dibutuhkan, sedangkan penerimaan yang bersifat temporer seperti: *fa'i, ghanimah*, serta harta yang tidak memiliki pewaris.

Perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh *revolusi industry* yang disertai dengan kemajaun ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan aktivitas Negara Islam Moderen semakin meluas dan berkembang. Saat ini, Negara Islam harus bisa menyediakan berbagai sarana sosial-ekonomi yang menunjang pengembangan pendidikan, industry, transportasi, telekomunikasi, hingga pelayanan medis. Oleh karena itu, dengan meningkatnya hajat kebutuhan masyarakat bagi sebuah Negara, maka Negara dapat memungut pajak untuk menambah pendapatan Negara serta dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang terus meningkat.

Muhammad Sharif Chaudhry berpendapat bahwa Negara Islam modern dapat memungut pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak penjualan, bea-cukai, pajak hadiah, pajak property, pajak dari *capital gain*, dan sebagainya sebagai sarana penerimaan sebuah Negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:²⁶

1. Pemungutan pajak hendaklah dikarenakan alasan darurat, seperti keperluan dan kebutuhan Negara yang mendesak dan sebenarnya, bukan untuk kepentingan para penguasa.
2. Penggunaan hasil pungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan jujur, serta dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum tanpa ada diskriminasi.
3. Dalam menetapkan tarif pajak dan pemungutannya harus berdasarkan prinsip pemerataan, kejujuran dan keadilan.
4. Ketika tujuan dipungutnya pajak itu telah tercapai, maka pemungutan pajak hendaklah dihentikan.
5. Regulasi dan hukum pajak haruslah konsisten dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.

Di Indonesia pengaturan zakat sebagai pengurang pajak diatur dalam UU No. 38 Thn. 1999 tentang pengelolaan Zakat, kemudian diubah menjadi UU No. 17 Thn. 2000, yang menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata

²⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan termasuk obyek pajak bagi penerima zakat dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Selain itu, besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan. Selanjutnya undang-undang tersebut diperbarui lagi menjadi UU No. 23 Thn. 2011, dimana pengaturan zakat sebagai pengurang zakat lebih tegas dan jelas dari pada UU sebelumnya, karena peraturan pelaksana undang-undang zakat lebih banyak dikeluarkan dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengakomodir ketentuan Undang-undang zakat sebagai pengurang pajak. Zakat sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak (PKP) memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, dengan kesadaran masyarakat membayar zakat dan pajak maka akan semakin meningkat muzakki dan sudah tentu akan meningkatkan pendapatan Negara.

Dalam QS Al An'am ayat 165 menjelaskan:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada kalimat “penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat” diperuntukkan bagi para pemerintah atau penguasa dalam sebuah Negara/daerah atas tanggung jawab yang mereka emban bagi kepentingan masyarakat. Ayat diatas menggambarkan mengenai kemandirian keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran suatu daerah, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa Negara atau daerah).

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk menentukan keadaan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua komponen usaha dalam wilayah tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh oleh semua unit ekonomi dalam suatu daerah, terlepas dari apakah transaksi tersebut dilakukan oleh suatu masyarakat (*resident*) ataupun masyarakat lain (*nonresident*).²⁷ Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah semua unit usaha atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu daerah.²⁸

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan, dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah/provinsi dalam menghasilkan sumber daya ekonomi, pergeseran, struktur ekonomi daerah, serta memperlihatkan pendapatan yang memungkinkan dinikmati oleh penduduk daerah/provinsi tersebut. Sedangkan PDRB konstan, digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi secara riil tiap tahunnya, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak terpengaruh oleh faktor harga.²⁹

Tingkat PDRB di suatu daerah berbeda dengan tingkat PDRB di daerah lain. Hal ini disebabkan perbedaan potensi ekonomi dan tenaga ahli yang dimiliki wilayah tersebut. Jika suatu daerah memiliki banyak sumber daya alam dan mampu mengolahnya dengan baik maka nilai PDRB wilayah tersebut akan tinggi.³⁰

²⁷ Yosi Suryani and Rudy Rinaldy, "Perkembangan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018," *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 11, no. 2 (2019): 361–374.

²⁸ Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, and Yuciana Wilandari, "Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)," *Jurnal Gaussian* 2 (2013): 219–228, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>.

²⁹ Denny Cessario Sutrisno, "Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah," *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 435–445, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

³⁰ Hijri Juliansyah and Sulkadria, "Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 01, no. 02 (2018): 58–64, http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional.

2.2.2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Yaitu proses peningkatan produksi dalam negeri untuk suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Ada banyak teori pertumbuhan ekonomi dalam perkembangannya, seperti teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan Kuznett, teori pertumbuhan Harrod Domar, dan teori pertumbuhan Schumpeter.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith mengungkapkan bahwa, pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi. Sebaliknya, menurut David Ricardo, jika faktor pertumbuhan penduduk berlipat ganda sekaligus, maka angkatan kerja akan menjadi berlebihan, upah akan turun, dan kesejahteraan masyarakat daerah juga akan menurun.

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Secara teori, Solow-Swan mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Berdasarkan penelitiannya, Solow menyatakan bahwa peran kemajuan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Menurut teori ekonomi neoklasik, keterbelakangan Negara-negara berkembang disebabkan oleh alokasi sumber daya secara keseluruhan yang tidak memadai, yang sebelumnya didasarkan pada kebijakan penetapan harga yang tidak memadai dan intervensi pemerintah yang berlebihan.

3. Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznett mengartikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan negara tersebut untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Peningkatan kapasitas ini didorong oleh peningkatan yang stabil dalam produksi nasional, kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi.³¹

4. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini menekankan pada konsep laju pertumbuhan alamiah, yang memperhitungkan peningkatan efisiensi pendidikan dan pelatihan, serta jumlah tenaga kerja faktor produksi. Model ini dapat menentukan jumlah tabungan atau

³¹ Dio Syahrullah, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-20112" (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id>.

investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi alami. Ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi alami dikalikan dengan rasio modal terhadap produksi. Harrod-Domar menyatakan bahwa untuk memanfaatkan sepenuhnya semua barang modal yang tersedia, permintaan agregat perlu meningkat sebesar peningkatan kapasitas barang modal yang direalisasikan sebagai hasil dari investasi masa lalu. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik, nilai investasi harus meningkat dari tahun ke tahun.

5. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peran wirausahawan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Teori ini menunjukkan bahwa wirausahawan adalah kelompok yang secara terus menerus memperbaharui atau berinovasi dalam kegiatan ekonomi. Berbagai kegiatan inovasi ini membutuhkan investasi baru. Menurut Schumpeter, semakin besar kemajuan ekonomi, maka semakin terbatas peluang inovasi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

2.2.3. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam menghitung produk domestik bruto atas dasar harga berlaku, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode langsung dan tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang memperlihatkan keadaan wilayah, yang diambil dari sumber data yang ada di wilayah tersebut. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan:

1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi dengan menghitung selisih antara nilai total masing-masing sektor dengan biaya input yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Pendekatan ini sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah suatu sektor atau kegiatan di mana produksi berupa aset atau barang berwujud. Unit produksi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yaitu perikanan, pertanian,

kehutanan, peternakan, pertambangan dan penggalian, manufaktur, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, telekomunikasi dan transportasi, real estate, keuangan dan jasa.³²

2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi daerah/wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).³³ Faktor-faktor kompensasi produksi meliputi upah dan gaji, sewa, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan ini merupakan jumlah total pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran berfungsi untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk kepentingan konsumsi pribadi, sumbangan pemerintah dan sosial, pembentukan modal, dan ekspor. Nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi dalam negeri. Total pengeluaran komponen tersebut harus dikurangi dari nilai impor agar nilai ekspor yang bersangkutan menjadi ekspor neto. Jumlah semua elemen pengeluaran akhir disebut PDRB berdasarkan harga pasar.³⁴

b. Metode Tidak Langsung (Alokasi)

Metode tidak langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan. Misalnya, dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dana atau lainnya yang cocok dijadikan alokator. Dengan memetakan data ini ke daerah yang terkena dampak, perkiraan dibuat berdasarkan alokasi.

³² Julnando Lim et al., "Peningkatan PDRB Kota Batam Pada Tahun 2019-2020," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 124, no. 3 (2014): 358–363, <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2014143423>.

³³ A Mudji and W Taripar, "Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang," *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018): 35–46, <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/PANGRIPTA/article/download/8/5>.

³⁴ Yofhi Septian Panglipurningrum and Tri Nurdyastuti, "Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 – 2019," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2020): 211–222.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Ada empat metode yang diketahui untuk menghitung harga konstan yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.³⁵

a. Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa tahun berjalan dengan harga tahun dasar. Kenaikan nilai yang signifikan pada harga tetap disebabkan oleh perbedaan antara biaya produksi dan input pada harga tetap.

b. Ekstrapolasi

Menurut ekstrapolasi, nilai tambah berdasarkan harga tetap untuk tahun tertentu adalah hasil perkalian nilai tambah untuk tahun dasar tertentu dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolasi dapat berupa indeks untuk setiap produksi yang dihasilkan, atau indeks untuk berbagai indikator seperti: tenaga kerja, jumlah perusahaan lain yang dianggap sesuai untuk jenis kegiatannya. Ekstrapolasi juga bisa dilakukan terhadap jumlah produksi pada tahun dasar tertentu dikalikan dengan jumlah produksi pada harga tertentu dan jumlah produksi pada tahun dasar tertentu dengan rasio nilai tambah yang tetap untuk memperoleh perkiraan nilai tambah pada harga tertentu.

c. Deflasi

Metode deflasi adalah nilai tambah berdasarkan harga berlaku setiap tahun berjalan dibagi dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau indeks harga lain yang dapat mewakili kenaikan harga setiap kegiatan ekonomi.

d. Deflasi Berganda

Metode deflasi berganda hampir sama dengan metode deflasi, tetapi yang membedakan hanyalah bagaimana nilai output dan biaya antara dideflasi dengan indeks harga yang mewakili/sesuai. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator output adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kuantitas komoditi. Indeks harga faktor input dominan/terbesar digunakan sebagai deflator untuk konsumsi antara. Pada kenyataannya, sulit untuk mengurangi biaya antara, kecuali komponen yang

³⁵ BPS Kabupaten Lamandau, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab . Lamandau Tahun 2013 / 2014* (Lamandau: BAPPEDA Kabupaten Lamandau, 2014).

terlalu banyak, dan indeks harga yang belum tersedia. Oleh karena itu, deflasi ganda ini tidak banyak digunakan ketika menghitung NTB berdasarkan hargakonstan.

2.2.4. Fungsi Aadaanya Data PDRB

1. PDRB berdasarkan harga berlaku secara nominal menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah atau provinsi, dan nilai PDRB yang besar juga menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan pendapatan yang dapat dinikmati bagi semua penduduk suatu wilayah atau provinsi.
3. Produk domestik bruto dengan harga tetap digunakan untuk merepresentasikan tingkat pertumbuhan ekonomi sektoral secara keseluruhan.
4. Distribusi produk domestik bruto berdasarkan harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur dan ukuran sektor ekonomi di wilayah tersebut, dan sektor ekonomi yang berperan besar dalam menunjukkan basis ekonomi wilayah tersebut.
5. PDRB menurut pengeluaran menunjukkan bagaimana barang dan jasa digunakan untuk konsumsi, investasi, serta diperdagangkan dengan pihak luar.
6. Distribusi produk domestik bruto menurut pengeluaran menunjukkan peran lembaga dalam barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi.
7. Produk domestik bruto menurut pengeluaran pada harga tetap membantu mengukur tingkat pertumbuhan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, serta perdagangan antar pulau dan provinsi.
8. PDRB per kapita dan PDRB dengan harga tetap akan membantu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi per kapita yang sebenarnya.
9. Produk domestik bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai produk domestik bruto per kapita atau per kapita penduduk.

2.2.5. PDRB dalam Prespektif Ekonomi Islam

Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penerapan standar *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan sejati dengan unsur spiritual. Oleh karena itu, selain memasukkan unsur *falah* dalam analisis kesejahteraan. Dalam perhitungan GDP riil pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu memahami bagaimana hubungan antara instrumen zakat, wakaf dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Al-Qur'an,

Allah akan selalu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang menganut nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A`raf Ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : “Dan Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), Maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan.”

Berdasarkan ayat ini, dapat kita ketahui bahwa selama kita rajin melakukan istighfar (minta ampun), maka kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Allah menjamin umatnya banyak makan. Jika orang-orang tersebut meninggalkan kemaksiatan dan selalu ingin mengikuti nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Allah telah menjamin rizki yang melimpah bagi umatnya. Jika kaum tersebut ingin terbebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajaela dan masyarakat tidak taat pada Tuhannya (Allah), maka tidak akan diperoleh suatu ketenangan dan kestabilan hidup.

Dalam perekonomian konvensional, PDRB mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, dalam ekonomi Islam, PDRB riil dapat mempengaruhi penerimaan zakat dan pajak. Karena dalam ekonomi Islam, pendapatan per kapita yang tinggi tidak cukup untuk menilai kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga dengan adanya ukuran *falah* dalam menghitung pendapatan nasional per kapita Negara-negara Islam. Peningkatan PDB di negara-negara Islam akan berdampak positif karena pendapatan pemerintah seperti zakat, kharraj dan sedekah akan meningkat karena peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Investasi

2.3.4. Pengertian Investasi.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari akar kata *invest* yang berarti menanam, atau dari bahasa latin *investire* yang berarti menggunakan, dan *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menyuburkan, berkembang dan memperbanyak jumlahnya.³⁶ Dalam teori ekonomi investasi didefinisikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal oleh perusahaan untuk membeli barang-barang

³⁶ Elif Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.

modal dan fasilitas produksi untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Sedangkan menurut UU No.25 Tahun 2007 mengatakan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa investasi adalah sekumpulan pengeluaran yang dilakukan oleh seorang investor untuk mendanai kegiatan produksi guna menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi berasal dari penanaman modal langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan produksi. Investasi, yang biasa disebut dengan penanaman modal, mempengaruhi perekonomian nasional dan juga perekonomian wilayah. Bagi negara, investasi tidak hanya memaksimalkan produksi, tetapi juga membantu menentukan distribusi tenaga kerja dan pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Kehadiran investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang.³⁷

2.3.5. Teori Investasi

Dalam jangka panjang peningkatan investasi akan berdampak terhadap peningkatan *stok capital* dan produktivitas. Beberapa teori mengenai investasi :³⁸

1. Teori Klasik

Ekonom klasik berpendapat bahwa investasi adalah fungsi dari suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah keinginan untuk berinvestasi. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat bunga, maka akan semakin kecil biaya penggunaan dana, dan akan mendorong pengusaha untuk berinvestasi. Kaum klasik menganggap akumulasi modal sebagai syarat mutlak pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa investasi dapat meningkatkan pendapatan.

³⁷ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoritis Dan Empiris*, Cet. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

³⁸ Selli Imaniar, "Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2012-2016)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

2. Teori *Marginal Efficiency of Capital* dari Keynes

Menurut Keynes, suku bunga tidak hanya menyebabkan fluktuasi investasi, tetapi juga potensi keuntungan yang diharapkan dari serangkaian investasi, yang disebut Keynes sebagai *marginal efficiency of capital* (MEC). Keuntungan yang diharapkan berarti berapa persentase keuntungan yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari tingkat bunga, maka sangat wajar jika pengusaha melakukan investasi.

3. Teori Neoklasik

Menurut teori ini, persediaan modal yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa modal relative terhadap harga output. Demikian pula, harga jasa modal tergantung pada harga barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak perusahaan. Oleh karena itu, menurut teori ini, perubahan produksi mengubah atau mempengaruhi persediaan modal dan investasi yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pembiayaan dan investasi adalah suku bunga, depresiasi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah.

4. Teori Akselerator

Teori ini berpendapat bahwa, peningkatan investasi disebabkan oleh peningkatan permintaan efektif dan konsumsi masyarakat, dan hal tersebut sangat tergantung pada koefisien akselerasi (percepatan), yaitu rasio peningkatan investasi terhadap peningkatan konsumsi. Menurut prinsip akselerator, pertumbuhan output yang cepat akan merangsang investasi.

5. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod Domar didasarkan pada pandangan para ekonom sebelumnya yang menggabungkan pandangan klasik dan Keynesian, yang menekankan peran pertumbuhan modal dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod Domar mengasumsikan bahwa pembentukan modal dipandang sebagai biaya peningkatan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, serta biaya peningkatan permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan.

2.3.6. Macam-Macam Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilakukan dengan memanfaatkan sepenuhnya modal asing atau melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing secara patungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik asing di dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Penanaman modal asing ini dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) atau penanaman modal portofolio, yaitu dengan membeli saham suatu perusahaan di dalam negeri (Indonesia).

Manfaat penanaman modal asing bagi kita adalah dalam bentuk pengolahan sumber daya alam kita, peningkatan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah (*added value*), peningkatan pendapatan pemerintah dari sumber pajak, serta transfer teknologi. Bagi pemilik asing, keuntungannya berupa aliran dividen dari kinerja berasal dari negara tempat modal ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 1 (2) menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.³⁹ Sedangkan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan rakyat Indonesia, termasuk hak-hak dan harta benda yang dimiliki Negara Indonesia maupun swasta asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk melakukan sebuah usaha sepanjang modal terakhir tidak diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Pihak swasta yang bermodal dalam negeri dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

³⁹ Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 9–16.

Untuk dapat membedakan apakah perusahaan tersebut perusahaan asing ataukah perusahaan nasional, hal ini bisa dilihat dari kepemilikan modalnya. Perusahaan nasional merupakan perusahaan yang modal dalam negrinya minimal 51% yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional. Dan jika berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka minimal 51% dari total sahamnya harus saham atas nama. Menurut peraturan yang berlaku, persentase itu harus selalu dinaikkan agar dapat mencaapi 74%, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut termasuk perusahaan asing.⁴⁰

Manfaat investasi Dalam Negeri, adalah untuk menghemat cadangan devisa, mendorong kemajuan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan produk asing, serta memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Selain penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu pembagian penanaman modal menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, lalu penanaman modal berdasarkan pembiayaan awal atau perolehan dana kegiatan dapat dibedakan menjadi dua kategori peningkatan, sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct invesment*), Investasi langsung adalah kegiatan penanaman modal yang melibatkan pendapatan tetap, dan pemindahan dana proyek jangka panjang dengan tujuan mendapatkan pendapatan regular, serta menimbulkan risiko usaha. Investasi langsung ini dapat dilakukan melalui penciptaan usaha patungan dengan mitra lokal untuk berkolaborasi tanpa mendirikan perusahaan baru. Mengubah pinjaman menjadi kendali bisnis lokal, memberikan dukungan teknis dan material, dan menerbitkan lisensi. Investasi dilakukan langsung oleh investor secara langsung terlibat ke dalam manajemen dan bertanggung jawab langsung jika terjadi kerusakan.
2. Investasi Tak Langsung (*Portofolio Investment*), didefinisikan sebagai kegiatan investasi jangka pendek yang melibatkan perdagangan di pasar modal dan pasar uang. Investasi ini disebut investasi jangka pendek, hal ini karena jual beli saham dalam waktu yang relatif singkat biasanya tergantung pada nilai saham dan fluktuasi mata uang yang mereka perdagangkan.

Di sisi lain investasi berdasarkan sumber daya yang digunakan, dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

⁴⁰ Arif Nur Hidayat, "Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2007 – 2017" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

1. Investasi Negara atau publik, adalah investasi oleh pemerintah, atau sumber dana untuk investasi tersebut berasal dari aset pemerintah. Pada kenyataannya, investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik tersebut bersifat nonprofit atau nirlaba. Seperti, pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, taman, pasar, listrik, rumah sakit, pelabuhan, bandara, terminal, alutsista, kantor pemerintahan, dll. Dana atau dana yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau (APBD).
2. Investasi Swasta, investasi yang dikerjakan masyarakat atau pengusaha, untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk laba. Karakteristik investasi tersebut dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan. Contohnya Usaha Mikro (belum berbadan hukum), usaha kecil menengah berbadan hukum (UKM), dan perusahaan besar berbentuk PMA atau PMDN.

Dari perspektif modal atau kekayaan, investasi dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

1. Real aset adalah investasi yang berwujud, seperti kendaraan, gedung dan sebagainya.
2. Financial aset, yaitu dokumen yang diperdagangkan di pasar uang (surat berharga) seperti deposito, surat berharga, surat berharga pasar uang (SBPU).

Selanjutnya jika investasi berdasarkan dampaknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Investasi *autonomous* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, yang bersifat spekulatif, seperti pembelian surat-surat berharga.
2. Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan), yaitu investasi yang dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa serta kenaikan tingkat pendapatan. Seperti pendapatan transitori (pendapatan yang dihasilkan selain dari bekerja), yaitu berupa bunga tabungan.

2.3.7. Prosedur Penanaman Modal di Jawa Tengah

Penanaman modal di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah prosedur yang digunakan berlandaskan pada Peraturan Kepala (PERKA) BKPM Nomor 12 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2010. Pendirian usaha investasi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Untuk perusahaan luar negeri atau asing dapat berbentuk kantor perwakilan

(*Representatives Office*) atau dalam bentuk lain. Prosedur penanaman modal asing di Jawa Tengah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pusat organisasi penanaman modal, dan pelaksanaannya didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengelola penanaman modal di daerah tersebut.

Proses investasi dibagi menjadi tiga fase yaitu: fase persiapan, fase konstruksi, dan fase operasi/produksi, yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua minggu. Pada fase persiapan, penanam modal asing memberitahukan kepada lembaga penanaman modal asing terkait proyek yang akan dilaksanakan, modal yang akan ditanamkan, rencana produksi, penjualan yang diharapkan, jumlah karyawan, dan nama-nama karyawan dan calon pemegang saham perusahaan asing. Setelah lembaga memberikan izin dalam tahap persiapan, lalu bisa digunakan untuk mengurus izin utama, yaitu izin yang harus dimiliki untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Fase selanjutnya merupakan fase konstruksi, pada fase ini, pemohon penanaman modal asing melengkapi dokumen terkait sarana, dan prasarana, untuk merealisasikan Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang digunakan untuk mengajukan izin usaha tetap. Di sisi lain, pada fase operasional/produksi, pemohon dapat menyelesaikan proses perizinan utama dan izin usaha tetap wajib dan menjalankan usahanya sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi keberlangsungan penanaman modal asing.

2.3.8. Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pada prinsipnya, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan syariah merupakan usaha yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten), dan pemilik usaha yang ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Kegiatan investasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau terlibat langsung dalam praktik bisnis dan investasi. Ia mencontohkan bagaimana mengelola sebuah investasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini terkait erat dengan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai pedagang dan pengelola usaha (*mudharib*). Rasulullah menjalankan bisnisnya dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur kepada pemilik modal (investor). Oleh karena itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, tetapi justru dianjurkan agar memberikan keuntungan yang besar melalui penciptaan lapangan kerja dan bidang usaha baru.

Adapun Firman Allah SWT yang memaparkan tentang Investasi terdapat dalam QS. *Al Baqarah* ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."

Secara implisit ayat ini memberikan gambaran akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menginformasikan bagaimana beruntungnya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah baik itu dengan investasi dunia maupun investasi untuk akhirat. Orang yang kaya secara *financial* (keuangan) membelanjakan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu melalui kegiatan yang produktif, maka sebenarnya dia telah menolong ribuan, bahkan jutaan orang miskin untuk bisa berproduktif ke arah yang lebih baik.⁴¹

Di Indonesia secara khusus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 15 fatwa yang berhubungan dengan pasar modal syariah, salah satunya fatwa No. 80/DSNMUI/III/2011 yang mengatur bagaimana cara memilih investasi yang diperbolehkan syariat dan melarang usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam aktifitas investasi dan bisnis.

2.4. Inflasi

2.4.1. Pengertian dan Teori Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kecenderungan harga secara umum dan terus menerus mengalami kenaikan. Kenaikan satu atau dua komoditi tidak dianggap sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga komoditi lain. Seperti naiknya harga bahan bakar minyak.⁴² Di sisi lain, Adi Warman Karim mengungkapkan, inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum suatu komoditi/barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat dilihat sebagai fenomena moneter yang dihasilkan dari depresiasi suatu komoditas dalam

⁴¹ Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris."

⁴² Nazeli Adnan, "Analisis Penghitungan Inflasi Berdasarkan Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan Periode 2001 - 2011," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 2 (2011): 141–149.

satu unit mata uang.⁴³ Sedangkan, menurut FW Peish, inflasi merupakan suatu kondisi di mana pendapatan nasional naik jauh lebih cepat daripada pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Dari pengertian di atas, perlu ditegaskan bahwa pengertian inflasi memiliki beberapa aspek yaitu:⁴⁴

1. *Tendency*, yaitu berupa kecenderungan meningkatnya harga-harga, maksudnya dalam waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga namun secara keseluruhan mempunyai kecenderungan untuk meningkat.
2. *Sustained*, kenaikan harga yang berkelanjutan dan terus meningkat, tidak hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
3. *General level of price*, harga yang berhubungan dengan inflasi, umumnya dimaksudkan sebagai harga suatu komoditas, bukan satu atau dua jenis komoditas saja.

Secara garis besar ada lima kelompok teori yang membahas mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dalam proses inflasi yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Teori Kuantitas, merupakan teori inflasi tertua, teori ini menyatakan bahwa inflasi hanya dapat terjadi jika jumlah uang beredar meningkat (baik dalam bentuk tambahan uang kartal atau uang giral). Inflasi juga ditentukan oleh laju kenaikan jumlah uang beredar dan psikologi masyarakat (ekspektasi) terhadap inflasi ke depan.
2. Teori Klasik, berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar. Hal ini dapat dijelaskan dengan hubungan antara nilai uang dan harga. Jika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan barang, nilai uang menurun, dan ini serupa dengan kenaikan harga. Solusi dari teori ini adalah dengan membatasi jumlah uang beredar dan kredit.
3. Teori Keynes, menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar kemampuan ekonominya (*disposable income*). Hal ini mengarah pada situasi dimana permintaan masyarakat terhadap barang melebihi jumlah barang yang tersedia sehingga menimbulkan *inflationary gap*. Inflasi akan terus berlanjut selama permintaan efektif masyarakat melebihi produksi yang dapat dihasilkan masyarakat.

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi 3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁴⁴ Agus Budi Santosa, "Analisis Inflasi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017* (2017): 445–452.

⁴⁵ Oktiani, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

4. Teori Strukturalis, adalah teori inflasi jangka panjang karena menekankan penyebab inflasi dari kekuatan struktur ekonomi, terutama kekakuan pasokan pangan dan ekspor. Karena alasan struktural, produksi komoditas melambat dibandingkan dengan permintaan yang meningkat, sehingga menyebabkan kenaikan harga pangan, dan kelangkaan devisa.

2.4.2. Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat dikategorikan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.⁴⁶

a. Inflasi berdasarkan sifatnya

1. Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini diperlukan untuk perekonomian karena merangsang produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), besarnya 10-30% per tahun. biasanya ditandai dengan harga-harga yang naik dengan cepat dan relatif cepat. Tingkat inflasi dalam keadaan ini biasa disebut dengan inflasi dua digit, misalnya 15%, 20%, 30%.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi antara 30-100% per tahun.
4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga-harga secara tajam hingga empat digit (100% lebih). Dalam keadaan ini, nilai uang berkurang secara signifikan, dan Anda tidak ingin menghemat uang, sehingga lebih baik menukarnya dengan produk.

b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

1. *Demand Pull Inflation*, inflasi ini disebabkan oleh dampak permintaan, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan penawaran. Menurut hukum permintaan, jika permintaan tinggi dan penawaran konstan, harga akan naik. Jika ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan inflasi berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penambahan tenaga kerja baru dan pengembangan kapasitas produksi baru.
2. *Cost Push Inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau faktor-faktor biaya produksi. Karena faktor produksi yang lebih tinggi, produsen dapat melakukan dua hal, yaitu menaikkan harga produk secara langsung dengan

⁴⁶ Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007).

penawaran yang sama, atau menaikkan harga produk dengan mengurangi volume produksi.

3. *Bottle Neck Inflation*, Inflasi ini disebabkan oleh faktor penawaran atau permintaan. Adapun faktor penawaran, masalahnya pada kapasitas yang ada sudah terpakai, namun permintaanya tetap tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Sedangkan Inflasi karena faktor permintaan disebabkan oleh banyaknya likuiditas, baik dari sisi keuangan atau dari ekspektasi yang tinggi terhadap permintaan baru.

c. Inflasi berdasarkan asalnya

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), disebabkan oleh kurangnya keuangan pemerintah untuk anggaran belanja negara. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah biasanya menerapkan kebijakan pencetakan uang baru.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), Inflasi ini terjadi karena suatu negara mitra dagang mengalami inflasi yang tinggi. Naiknya harga di luar negeri atau di mitra dagang utama (terutama karena nilai tukar yang lebih rendah) yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi dan disertai dengan naiknya harga barang.

2.4.3. Pengukuran Inflasi

Angka indeks biasanya digunakan untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu. Indeks dibuat dengan mempertimbangkan jumlah komoditas dan jasa yang digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Kelompok barang dan jasa yang dipilih diberi bobot sesuai dengan kepentingan dan intensitas penggunaan masyarakat. Semakin tinggi penggunaan barang dan jasa, semakin besar bobotnya dalam perhitungan indeks. Oleh karena itu, perubahan harga barang dan jasa yang mempunyai bobot besar juga akan berdampak signifikan terhadap inflasi pada periode tersebut. Perubahan angka indeks dari waktu ke waktu dinyatakan dalam persentase dan merupakan besarnya tingkat inflasi selama periode tersebut. Angka indeks yang biasa digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

1. *Wholesale Price Index*/Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks harga perdagangan besar adalah indikator perekonomian suatu negara dan pada dasarnya mempengaruhi komoditas yang diperdagangkan di negara tersebut pada tingkat grosir/besar. Indeks Harga Grosir di Indonesia mencakup

lima sektor: ekspor (53 komoditas), pertanian (44 komoditas), impor (38 komoditas), pertambangan dan penggalian (6 komoditas).

2. *Consumer Price Index (CPI)*/Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah indeks yang memperhitungkan harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun pedesaan. IHK mengukur fluktuasi harga rata-rata suatu paket barang yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat/rumah tangga di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Tingkat perubahan indeks harga konsumen (IHK) bisa positif atau negative.

3. *Producer Price Index (PPI)*/Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur perubahan harga yang diterima oleh produsen dalam negeri untuk barang yang mereka produksi. IHP mengukur tingkat harga yang terjadi di tingkat produsen.

Selain 3 indikator umum inflasi di atas, terdapat dua indikator inflasi lain yang bisa digunakan sebagai alat ukur perubahan tingkat harga, yaitu:

1. PDB Deflator (Produk Domestik Bruto Deflator)

PDB deflator mengukur fluktuasi harga di seluruh perekonomian. Besarnya fluktuasi harga yang diukur oleh deflator PDB lebih luas dari IHK dan IHPB. Angka deflator dihitung dengan membandingkan PDB nominal tahun tertentu dengan PDB tahun tertentu. Deflator PDB menunjukkan besarnya fluktuasi harga untuk semua produk baru, produk yang diproduksi secara lokal, barang manufaktur dan jasa.

2. Indeks Harga Aset (IHA)

Fluktuasi harga aset baik untuk aset real estat maupun ekuitas dapat digunakan sebagai indikator seluruh tekanan harga. Dalam hal ini, Indeks Harga Aset (IHA) mencerminkan potensi tekanan permintaan di masa depan dengan memeriksa bagaimana konsumsi pribadi berubah tergantung pada nilai aset seseorang (*jalur efek aset*).

2.4.4. Pengukuran Inflasi di Indonesia

Indeks (indikator) yang biasa digunakan untuk menghitung inflasi di Indonesia adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Mankiw berpendapat ada hubungan yang sangat erat antara IHK dan inflasi, perubahan IHK menggambarkan perubahan harga. Inflasi IHK di Indonesia dihitung menggunakan berbagai survei dan sensus, termasuk sensus ekonomi yang

digunakan untuk menentukan kerangka sampling pasar/toko/outlet. Survei biaya hidup digunakan untuk menentukan keranjang komoditas. Sensus dan survei sosial ekonomi nasional untuk menentukan jumlah rumah tangga.⁴⁷

Awal tahun 1950-an, IHK hanya mempertimbangkan harga beberapa bahan makanan. Selain itu, wilayah yang dijadikan wilayah survei masih sangat terbatas, hanya beberapa kota besar di Indonesia seperti: Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan dan Pontianak. Indeks harga konsumen terus membaik dalam perkembangannya. Seiring dengan perkembangan situasi sosial ekonomi konsumen Indonesia, jumlah komoditas dan jasa yang dihitung berdasarkan indeks terus meningkat. Hal yang sama berlaku untuk cakupan wilayah yang dipertimbangkan di wilayah survei. Per Januari 2014, IHK ditampilkan berdasarkan tahun dasar 2012 = 100 (Survei Biaya Hidup 2012) dan mencakup 82 kota termasuk 33 ibu kota provinsi dan 49 kota besar di Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007 = 100 (Survei Biaya Hidup 2007) dan hanya mencakup 66 kota.⁴⁸

Dalam penghitungan IHK di Indonesia, rumus yang digunakan adalah rumus Laspeyres yang dimodifikasi. Adapun rumus Indeks Laspeyres yang dimodifikasi sebagai berikut :

$$I_L = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \cdot 100$$

Dengan : I_L = Indeks harga konsumen bulan/tahun ke n

P_{ni} = Harga jenis barang i bulan/tahun ke n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang i bulan/tahun ke (n-1)

$P_{(n-1)i} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada bulan/tahun ke (n-1)

$P_{oi} Q_{oi}$ = Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar

k = Jumlah jenis barang paket komoditi

Saat menghitung harga produk, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmatika, tetapi untuk beberapa produk seperti beras, minyak goreng, dan bensin, digunakan rata-rata geometrik. Tingkat inflasi dicatat dalam format indeks bulanan (mtm), tahunan (yoy), dan tahun kalender (ytd). Inflasi bulanan (mtm) menggambarkan tingkat perubahan IHK bulan berjalan dari IHK bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi tahunan adalah tingkat perubahan IHK bulan ini dan periode

⁴⁷ G.A. Diah Utari, Retni Cristina, and Sudiro Pambudi, "Inflasi Di Indonesia : Karakteristik Dan Pengendaliannya," *Bank Indonesia Institute* 23, no. 23 (2015): 1–64.

⁴⁸ Ibid.

yang sama tahun lalu. Inflasi tahun kalender adalah laju perubahan IHK bulan berjalan dari IHK bulan Desember tahun sebelumnya.

2.4.5. Dampak Inflasi

Pengaruh inflasi dapat dilihat pada distribusi pendapatan (*equity effect*), distribusi faktor produksi (*efficiency effect*) dan produk nasional (*output effect*).⁴⁹

- a. Dampak inflasi terhadap distribusi pendapatan, berdasarkan hal ini ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan. Kelompok masyarakat yang merasa dirugikan adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, mereka yang mengumpulkan kekayaan dalam bentuk uang tunai, serta pihak yang meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi. Sedangkan, kelompok yang menerima manfaat adalah mereka yang meningkatkan pendapatannya di atas inflasi, mereka yang memiliki aset fisik yang nilainya meningkat di atas inflasi, dan mereka yang menerima pinjaman dengan suku bunga di bawah inflasi.
- b. Dampak inflasi terhadap distribusi faktor produksi, inflasi dapat merubah pola distribusi faktor produksi. Jika permintaan terhadap komoditas tertentu meningkat, hal ini akan mendorong peningkatan produksi komoditas tersebut. Peningkatan produksi ini menyebabkan perubahan pola distribusi faktor. karena tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi akan lebih efisien tanpa adanya inflasi. Namun, sebagian besar ekonom berpendapat bahwa inflasi dapat membuat alokasi faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien.
- c. Dampak inflasi terhadap output, inflasi dapat mengakibatkan turunnya produksi. Dalam kondisi inflasi biasanya mengarah harga barang mendahului naiknya upah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan pengusaha, peningkatan keuntungan ini akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Namun jika inflasi tinggi (*hyperinflation*), akan terjadi sebaliknya, yaitu produksi berkurang. Dalam kondisi inflasi tinggi, nilai riil turun secara signifikan dan orang cenderung tidak menyukai uang tunai, sehingga transaksi mengarah pada barter dan biasanya menurunkan produksi komoditas. Inflasi dapat dikaitkan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan penurunan produksi. Kekuatan efek inflasi ini tergantung pada apakah inflasi disertai dengan peningkatan output dan input tenaga kerja. Jika produksi barang juga meningkat, maka peningkatan produksi ini sedikit banyak dapat

⁴⁹ Tini Utami, "Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi," *Majalah Ilmiah Gema Maritim* 13, no. 1 (2011): 8–12.

memperlambat inflasi. Tetapi ketika perekonomian mendekati kesempatan kerja penuh, dampak inflasi akan lebih besar. Inflasi dalam kesempatan kerja penuh sering disebut sebagai inflasi murai.

2.4.6. Pengendalian Inflasi

Adiwaman Karim, berpendapat inflasi dapat dikendalikan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar dan kecepatan peredaran uang, atau dengan meningkatkan jumlah barang yang diperdagangkan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi yaitu:⁵⁰

- a. Kebijakan Moneter, dilaksanakan oleh pemerintah atau otoritas keuangan dengan menggunakan pengubah suku bunga (*interest rates*) dan uang beredar (*money supply*) yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi inflasi, tujuan utama kebijakan moneter adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit kredit. Ada tiga cara bank sentral dalam mengatasi inflasi yaitu:
 1. Kebijakan diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih memilih menabung, dan mengurangi peredaran uang dimasyarakat.
 2. Kebijakan pasar terbuka, melalui penjualan surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
 3. Kebijakan cadangan kas, dengan cara menaikkan alokasi kas yang dimanfaatkan untuk mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat.
- b. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah atas pengeluaran dan penerimaan berupa pajak pemerintah. Upaya mengatasi inflasi antara lain dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dan memberikan pinjaman pemerintah dengan menerbitkan SUN (Surat Utang Negara).
- c. Kebijakan Nonmoneter dan Nonfinansial, kebijakan ini dilaksanakan dengan meningkatkan produksi, menstabilkan upah dan gaji (sering tidak dinaikkan), serta mengatur dan mengendalikan distribusi barang kebutuhan dan harga.

2.4.7. Inflasi dalam Prespektif Ekonomi Islam

Menurut Al-Maqrizi, inflasi umumnya terjadi karena harga-harga naik dan bertahan terus menerus. Selama periode ini, pasokan barang dan jasa terbatas karena konsumen sangat membutuhkannya, sehingga mereka harus mengeluarkan lebih

⁵⁰ Reni Mulyani, "Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 267–278.

banyak uang untuk jumlah barang dan jasa yang sama.⁵¹ Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi terjadi bukan hanya karena faktor alam, melainkan juga karena kesalahan manusia. Oleh karena itu, berdasarkan faktor penyebabnya, Al-Maqrizi mengelompokkan inflasi menjadi *natural inflation* dan *human error inflation*:⁵²

Natural Inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak dapat dicegah oleh manusia. Al-Maqrizi membedakan penyebab inflasi ini menjadi dua bagian yaitu:

1. Ekspor meningkat dan impor menurun, sehingga permintaan agregat akan meningkat karena terlalu banyak dana asing dan nilai ekspor bersih sangat besar. Peningkatan permintaan agregat menyebabkan peningkatan tingkat harga total. Ini pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Untuk mengatasinya, beliau melarang orang Madinah membeli barang dagangan selama dua hari berturut-turut. Akibatnya, permintaan secara keseluruhan akan menurun dan tingkat harga akan menjadi normal.
 2. Akibat berkurangnya tingkat produksi karena kelaparan, kekeringan, perang atau embargo. Kondisi ini juga terjadi pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ketika gandum langka dan harga naik. Akibatnya, beliau mengimpor gandum dari Mesir, sehingga total pasokan komoditas di pasar naik dan menurunkan harga.
- a. Faktor kesalahan manusia (*human error inflation*)

Human error inflation adalah Inflasi yang terjadi karena manusia sendiri melakukan kesalahan-kesalahan. Dimana sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa kehancuran bumi merupakan akibat dari pemujaan hawa nafsu. Telah terlihat kerusakan akibat perbuatan tangan manusia, yang dikuasai oleh hawa nafsu dan jauh dari hidayah fitrah, baik itu di darat maupun di laut, baik di kota maupun di desa. Allah

⁵¹ Fadilla, “Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam,” *Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 1–14.

⁵² Awaluddin, “Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 197.

menghendaki mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan buruk mereka dan ingin mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga perbuatan mereka sesuai dengan fitrahnya.

Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terjadi karena:

1. Korupsi dan buruknya administrasi, pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas. Para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan finansial dan kehidupan mewah. Akibatnya, pendapatan pemerintah akan berkurang secara signifikan.
2. Mencetak Uang Berlebih, ketika terjadi defisit anggaran karena kekurangan keuangan atau perilaku buruk oleh otoritas pemerintah yang menghabiskan uang Negara, pemerintah mencetak uang fulus dalam skala besar. Akibatnya, uang tidak lagi berharga.
3. Pajak yang tinggi, diakibatkan dari banyaknya pejabat pemerintahan yang bermental korup, sehingga pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mereka memberlakukan sistem perpajakan tinggi dan menerapkan berbagai jenis pajak. Akibatnya biaya produksi meningkat, dan mempengaruhi kenaikan harga produk industri.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendapatan asli daerah, PDRB, investasi dan inflasi dapat diringkas pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Dimas Priyono, Herniwati Retno Handaya	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah	Dependen : • PAD Independen : • PDRB • Inflasi	PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli	Analisis model yang digunakan adalah model regresi <i>fixed effect</i> . <i>Fixed effect model</i> adalah model regresi data panel

	ni (2021)	Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk <p>Model regresi <i>fixed effect</i>, dengan menggunakan data panel</p>	Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.	yang mengasumsikan perbedaan yang ada pada individu bisa diakomodasikan dari perbedaan intersepanya. Untuk data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).
2.	Anita Ika Novita, Suharno, Bambang Widarno (2016)	Pengaruh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> PAD <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> Investasi PDRB Belanja Modal <p>Analisis regresi linear berganda</p>	$Y = -134553871648,309 + 0,009X_1 + 34940,977X_2 + 0,326X_3$ <p>Variabel investasi, PDRB dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo.</p>	Menggunakan metode studi kasus, dengan data kualitatif dan kuantitatif. Selain itu penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu investasi, PDRB dan Belanja Modal.
3.	Dian Ramdani, Darmansy, Nurmalahmar (2021)	Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap PAD Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah	<p>Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> PAD <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> PDRB Belanja Modal Jumlah Penduduk Inflasi <p><i>Moderat Regression Analysis</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Penduduk dan Inflasi secara parsial mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Penduduk dan Inflasi memoderasi semua pengaruh Produk 	Dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi yaitu Jumlah Penduduk (JP) dan Inflasi (If). Kemudian untuk Metode yang digunakan mencakup uji konseptual model, analisis aloritm, dan <i>resampling</i> . <i>Grand theory</i> yang digunakan adalah <i>stewardship theory</i>

		Provinsi Jawa Barat		Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.	
4.	Muhamad Sirojul Munir (2021)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kudus	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • PAD Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Investasi • PDRB Analisis regresi linear berganda.	$Y = 762,935 + 13,675 JP + 2,142 PDRB - 3,040 I + e$ Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel investasi berpengaruh negative	Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data jumlah penduduk (berdasarkan jenis kelamin), investasi (permanen berupa penyertaan modal ke BUMD dan non permanen berupa dana bergilir), PDRB, serta PAD di Kabupaten Kudus tahun 2015-2020.
5.	Dewi Ernita (2021)	Analisis Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Krinci	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> • PAD Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Inflasi • PDRB Analisis Regresi Linear Berganda	$Y = -15,494 + 0,332 X1 + 2,046 X2$ Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan secara simultan, inflasi dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2018	Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu inflasi dan PDRB, selain itu sampel yang digunakan adalah inflasi dan PDRB di Kabupaten Krinci tahun 2010-2018

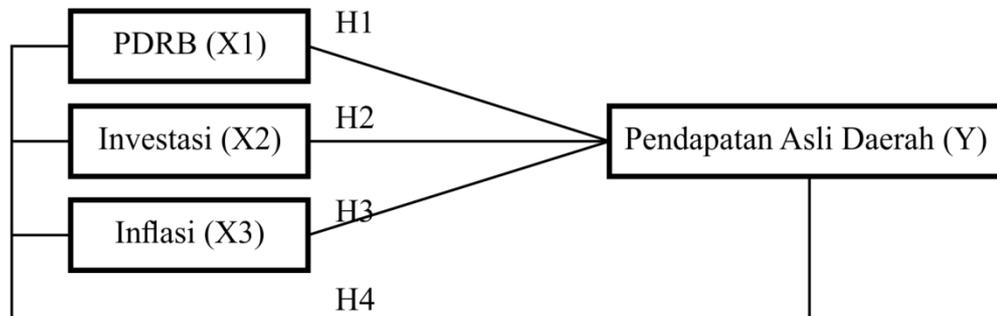
Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis deskripsikan diatas, ada perbedaan antara penelitian diatas dengan yang akan diteliti, yaitu pada penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh prouk domestik regional bruto dan investasi daerah serta menambahkan satu variabel independen lagi yaitu inflasi dengan variabel dependen

pendapatan asli daerah serta difokuskan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2014-2021.

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritik

Gambar 2.1

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah



Dari gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Inflasi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara parsial maupun simultan. Untuk Menguujinya penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

2.7. Hipotesis Penelitian

2.7.1. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari semua unit ekonomi dalam wilayah dan periode tertentu, ini berarti jika suatu daerah memiliki kegiatan konsumsi atau produksi maka akan mempengaruhi pendapatan daerah tersebut. Tingginya tingkat konsumsi seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut mampu secara ekonomi sehingga dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang didapatkan maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan naiknya PDRB berarti akan mendorong naiknya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojul Munir (2021) menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H1 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H₀ : Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H_a : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

2.7.2. Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal atau investasi adalah segala jenis kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di dalam wilayah Indonesia. Tingginya tingkat investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya dapat menghasilkan lapangan kerja baru. Selain itu, investasi juga memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang, serta dapat mempengaruhi keuangan daerah. Reza Tianto (2022), menyimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD..

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H2 : Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H₀ : Investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H_a : Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

2.7.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inflasi merupakan sebuah gejala ketika tingkat harga umum terus meningkat. Kenaikan tingkat harga secara umum sekali saja tidak bisa disebut inflasi.⁵³ Inflasi dapat menunjukkan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Jika nilai inflasi tinggi memang akan menurunkan kemampuan/daya beli masyarakat, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat secara umum dan terus menerus. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mengakibatkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan

⁵³ Rahmah Muin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Polewali Mandar," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016), <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/434>.

Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Dimas Priyono, dan Herniwati Retno Handayani (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.

H₀ : Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.

H_a : Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah.

2.7.4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H4 : Produk Domestik Regional Bruto, investasi, dan inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H₀ : Produk Domestik Regional Bruto, investasi, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

H_a : Produk Domestik Regional Bruto, investasi, dan inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber Data

Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*causal-comparatif research*). Menurut Indriantoro dan Soepomo, penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian yang memiliki ciri masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.⁵⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan judul “Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan”, “Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah”, dan “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Tengah”, kemudian juga mengambil data dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah dengan Judul “Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN di Jawa Tengah”. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data times series dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 atau lebih sering disebut dengan data panel.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau peristiwa dan hal-hal yang ingin diteliti.⁵⁵ Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah data produk domestik regional bruto, investasi, dan inflasi di Jawa Tengah selama periode 2014-2021. Sampel merupakan elemen dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap bagian atau anggota populasi untuk dijadikan sampel.⁵⁶

⁵⁴ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pert. (Yogyakarta: BPFE, 2009).

⁵⁵ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revi. (Surabaya: Zifatma Publishing, 2008).

⁵⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sering disebut juga sensus. Menurut Sugiyono, sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel ketika semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini sering dilakukan ketika populasinya relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relative kecil.⁵⁷ Nama lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Mendukung alasan di atas, jumlah sampel (n) dari data statistik time series setiap triwulan I-IV selama tahun 2014-2021 yaitu sebanyak 32 sampel.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi (*documentation*), yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi mengenai data dan fakta yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari dokumen, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs web, majalah, dan lain-lain. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan judul “Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan”, “Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah”, dan “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Tengah”, kemudian juga mengambil data dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah dengan Judul “Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN di Jawa Tengah”.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

2.5.1. Variabel Dependen

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri, yang dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pemerintah.⁵⁸ Untuk pengukuran variabel ini dapat dijumpai dari laporan realisasi pada pos pendapatan daerah. PAD dari pos realisasi anggaran terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Data ini

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, and Tri Henri Sasetiadi, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11, no. 1 (2016): 1–4.

sudah tersedia di laman Badan Pusat Statistik dengan judul “Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan”.

2.5.2. Variabel Independen

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan kemampuan daerah untuk mendapatkan pendapatan atau imbalan atas faktor-faktor yang ikut serta dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan pendapatan ini menggunakan konsep dalam negeri, yang mengandung pengertian bahwa setiap nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha di dalam wilayah atau region tanpa melihat kepemilikan faktor-faktor produksi.⁵⁹ Untuk pengukuran variabel PDRB dapat dilihat langsung pada situs BPS dengan judul “Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang diambil ialah data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2021 dalam bentuk triwulan dengan satuan miliar rupiah.

b. Investasi

Investasi adalah penempatan berbagai dana pada saat ini untuk memperoleh manfaat atau keuntungan berupa pengembangan yang memiliki nilai tambah di masa yang akan datang.⁶⁰ Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, penanaman modal adalah penempatan berbagai dana dan/atau barang oleh Pemerintah Pusat dalam jangka panjang untuk investasi dalam rangka pembelian surat-surat berharga dan investasi langsung, yang dapat mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.⁶¹ Pengukuran variabel dalam penelitian ini ialah laporan perkembangan realisasi PMA dan PMDN dalam bentuk triwulan Provinsi Jawa Tengah yang kemudian keduanya dijumlahkan, serta dinyatakan dalam satuan triliun rupiah. Data penelitian ini sudah tersedia di situs Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu

⁵⁹ Ramdani, Darmansyah, and Ahmar, “Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat).”

⁶⁰ Reza Tianto, “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2022): 113–124.

⁶¹ Bayu Rizaldi and Ahmad Guspul, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karisedenan Kedu 2014-2018,” *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 3, no. 1 (2021): 8–15.

Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Tengah dengan Judul “Perkembangan Realisasi Investasi PMA-PMDN di Jawa Tengah”

c. Inflasi

Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter terpenting dan ditemukan di sebagian besar negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan biaya untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar barang-barang lain.⁶² Dimana dalam penelitian ini menggunakan data inflasi triwulan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai dengan 2021 yang dinyatakan dalam persentase. Data penelitian yang digunakan sudah tersedia di situs BPS dengan judul “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Tengah”.

3.5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda. Menurut Santoso, analisis regresi berganda merupakan metode untuk mengembangkan model (persamaan) dengan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah PDRB, investasi, dan inflasi, sedangkan variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah. Rumus perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program komputer SPSS dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah (Satuan Triliun Rupiah)

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (Satuan Triliun Rupiah)

X2 = Investasi (Satuan Triliun Rupiah)

X3 = Inflasi (Satuan persen)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

ε = Variabel pengganggu

⁶² I Wayan Yudianta, I Gede Aryawan, and I Gusti Ayu Athina Wulandari, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Tabungan Dan Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat Di Bank Umum Provinsi Bali,” *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 (2019): 72–83.

Model yang dipakai untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Jika ada normalitas, maka residual akan berdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya atau kesalahan yang akan didistribusikan secara simetris di sekitar nilai means sama dengan nol. Untuk mengecek normalitas data, peneliti menggunakan uji *Normal Probability Plot*, dengan syarat jika titik atau data mendekati atau mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan nilai residual berdistribusi umum. Namun, jika titik-titik tersebut terpisah atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak terdistribusi secara normal. Selain itu peneliti juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka akan dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji untuk membuktikan adanya koorelasi antar variabel independen, dan hanya berlaku untuk penelitian yang variabel independennya lebih dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* pada model regresi. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, tetapi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10, maka terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan jika nilai $VIF < 10.000$ berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, tetapi jika nilai $VIF > 10,00$ maka akan terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, penelitian ini menggunakan Uji *Runs Test*. Dengan syarat, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05, maka terdapat masalah autokorelasi. Tetapi sebaliknya, jika Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi..

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang berbeda. Varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang berbeda tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Berikut beberapa metode pengujian heteroskedastisitas yang bisa digunakan diantaranya : yaitu uji glejser, uji park, uji koefisien korelasi spearman, dan melihat pola grafik regresi. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan uji *Scatterplots*. Dengan ketentuan, data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar nol, titik-titik data tidak hanya berkumpul di atas atau di bawah, maka penyebaran titik-titik informasi tidak boleh membentuk pola bergelombang yang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi, atau dengan kata lain penyebaran titik data tidak berpola. Selain itu peneliti juga menggunakan uji koefisien korelasi spearman. Yaitu dengan menganalisis korelasi antara residual dengan masing-masing variabel independen. Jika nilai signifikannya $> 0,05$ (5%) maka tidak terjadi penyakit heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dapat berupa hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, Investasi, dan Inflasi terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021.

b. Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Kriteria untuk pengujian uji F adalah, jika banyaknya nilai F hitung di bawah 0,05 (5%), maka disimpulkan masing-masing variabel independen yang diteliti secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikan 0,05 (5%). Untuk uji-t, penelitian ini membandingkan t-hitung dengan t-

tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa, wilayahnya terdapat di antara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia dan D.I. Yogyakarta di selatan, Provinsi Jawa Timur dibagian timur, serta Provinsi Jawa Barat disebelah barat. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan. Jawa Tengah tercatat memiliki luas wilayah sebesar 3,28 juta hektar atau sekitar 25,04 persen luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia).⁶³

Dalam kondisi topografi, wilayah Jawa Tengah sangat beragam, meliputi dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang sejajar dengan panjang Pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan juga pesisir, yaitu pesisir Utara dan Selatan. Kemiringan tanah Provinsi Jawa Tengah bermacam-macam, meliputi tanah dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%, tanah dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%, tanah dengan kemiringan 15-40% sebesar 19% dan tanah dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan merupakan dasar pertimbangan kesesuaian penggunaan lahan dan kinerjanya. Sedangkan kondisi fisiografis Jawa Tengah dibagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi yaitu Zona Randublatung, Perbukitan Rembang, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah Bagian Timur, Pegunungan Progo Barat, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Serayu Utara. Jenis tanah yang terdapat di Jawa Tengah meliputi organosol, litosol, aluvial, planosol, andosol, regosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi oleh jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini bisa menjadi jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.⁶⁴

⁶³ Indra Kertati et al., *Jawa Tengah Membangun Tahun 2021* (Semarang: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2021).

⁶⁴ Ibid.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 36.742.501 jiwa yang terdiri dari 18.472.627 penduduk laki-laki dan 18.269.874 jiwa populasi wanita. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,15 persen. Sedangkan besaran rasio jenis kelamin pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki ke jumlah penduduk perempuan adalah 101,11. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 1.120,17 jiwa/km². Sedangkan, kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk Tertinggi terdapat di kota Surakarta dengan kepadatan 11.361,18 jiwa/km² dan terendah ditempati oleh Kabupaten Blora sebesar 491,05 jiwa/Km².⁶⁵

Sektor ekonomi Jawa Tengah sangat beragam mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, hingga industri manufaktur. Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang mendukung pangan nasional, sehingga produktivitas padi lebih diprioritaskan, pada tahun 2021 jumlah produksi padi mencapai 9,77 juta ton, dengan luas panen 1,71 juta hektar. Selain itu, ada tanaman hortikultura seperti bawang merah, kentang, kubis dan cabai

4.2. Penyajian Data

Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, Investasi, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana gambaran perkembangan keseluruhan variabel penelitian selama delapan tahun terakhir.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah didapat dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁵ Tim penyusunan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022, *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022* (Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Tabel 4.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (dalam triliun rupiah)
Tahun 2014-2021

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV	Total
2014	2,256	2,221	2,746	2,693	9,916
2015	2,475	3,210	2,296	2,923	10,904
2016	1,978	3,533	2,791	3,236	11,538
2017	2,320	3,405	2,385	4,418	12,528
2018	3,049	3,429	3,551	3,819	13,848
2019	2,551	3,682	4,364	3,840	14,437
2020	3,084	3,344	3,276	3,785	13,489
2021	4,957	1,451	3,414	4,872	14,694

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan tabel 4.1 realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah triwulan I-IV tahun 2014 mencapai Rp9,916 triliun hal ini melebihi target dalam APBD 2014, yaitu sebesar 109,00%. Sedangkan pada tahun 2015 triwulan I-IV hanya mampu terealisasi sebesar 90,36% dari target APBD 2015 yaitu pada angka Rp10,904 triliun. Realisasi PAD pada triwulan I-IV tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp11,538 triliun, dimana mampu terealisasi sebesar 90,37% dari target APBD 2016. Sumber utama PAD 2016 diperoleh dari komponen pajak daerah dengan peranan sebesar 83,83% dari total PAD, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah (12,36%), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (2,95%). Peran pajak yang besar disebabkan oleh program bebas bea balik nama (BBN) dan bebas denda pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2016, dimana masyarakat mendapatkan keringanan penghapusan denda pajak, namun pajak terutang tetap dibayarkan.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017 triwulan I-IV sebesar Rp12,528 triliun, dimana hal tersebut melebihi target APBD 2017 sebesar 103,31%. Sumber utama PAD tahun ini bersumber dari pajak dengan peran sebesar 84,39%. Secara nominal, realisasi dari pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh gencarnya sosialisasi program bebas denda telat bayar pajak, serta gencarnya operasi gabungan terhadap ketertiban pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kontributor utama realisasi pendapatan daerah triwulan I-IV tahun 2018 adalah PAD yaitu sebesar 55,76% atau Rp13,848 triliun. Berdasarkan perannya terhadap total pajak daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih menjadi faktor utama pemasukan pajak daerah. Selanjutnya disusul oleh pajak rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Realisasi dana PAD pada triwulan I-IV tahun 2019 sebesar 99,65% atau Rp14,488 triliun. Berdasarkan komponen, realisasi PAD berasal pajak daerah dengan pangsa 82,79% dari total PAD, kemudian lain-lain PAD yang sah (12,87%), dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (3,55%). Pada triwulan I-IV tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan pada angka Rp13,489 triliun, hal ini dikarenakan pandemic covid-19 dan penurunan pendapatan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, terutama bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Selain itu, konsumsi dan daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan tersier juga ikut menurun. Namun pada triwulan I-IV tahun 2021 realisasi PAD kembali membaik yaitu sebesar Rp14,694 triliun atau sebesar 97,84% dari APBD tahun 2021. Beberapa upaya kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dilakukan seperti program perpanjangan implementasi insentif fiskal berupa pembebasan PPnBM untuk kendaraan bermotor sampai desember 2021. Selain itu juga terdapat pembebasan denda administrasi dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, serta penerapan Elektronisasi Transaksi Pemda (ETP).

4.2.2. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB menggambarkan nilai keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Proses perekonomian suatu daerah akan diukur dengan indicator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengetahui fleksibilitas sumber-sumber ekonomi yang dihasilkan, serta kemungkinan pendapatan yang akan dinikmati oleh penduduk suatu daerah/provinsi, seringkali diukur dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Total PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam triliun rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2014	213,432	232,461	242,294	237,008
2015	243,211	251,044	262,141	255,455
2016	262,469	271,567	282,631	276,230
2017	284,451	294,958	306,131	301,509
2018	305,190	316,003	327,066	320,442
2019	328,003	339,887	350,827	343,123
2020	341,805	324,714	344,114	337,966
2021	346,432	350,540	359,481	364,347

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 triwulan I sampai triwulan III terus mengalami kenaikan, namun pada triwulan IV mengalami penurunan pada angka Rp237,008 triliun. Triwulan I tahun 2015 PDRB ADHB sebesar Rp243,211 triliun dan naik sampai triwulan III sebesar Rp262,141 triliun, sedangkan triwulan IV turun menjadi Rp255,455 triliun. Rp262,469 triliun pada triwulan I 2016, Rp271,567 triliun pada triwulan II, Rp282,631 triliun pada triwulan III, dan Rp276,230 triliun pada triwulan IV. Pada triwulan IV 2016, kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor mengalami peningkatan. Sementara lapangan usaha industry pengolahan tercatat melambat dibandingkan triwulan III 2016.

PDRB Jawa Tengah ADHB tahun 2017 triwulan I sebesar Rp284,451 triliun, pada triwulan ini terjadi perlambatan pada lapangan usaha konstruksi, pertambangan dan penggalian. Kemudian naik menjadi Rp294,958 triliun pada triwulan II dikarenakan peningkatan pada industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh permintaan domestik yang menguat menjelang lebaran. Sedangkan pada triwulan III dan IV sebesar Rp306,131 triliun dan Rp301,509 triliun. PDRB ADHB Jawa Tengah triwulan I, II, dan III tahun 2018 pada angka Rp305,190 triliun, Rp316,003 triliun dan Rp327,066 triliun, kemudian pada triwulan IV turun sebesar Rp320,442 triliun hal ini dikarenakan kinerja lapangan usaha pertanian,

kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan pertumbuhan yang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Triwulan I tahun 2019 PDRB Jawa Tengah ADHB tercatat sebesar Rp328,003 triliun, industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan, sehingga menyebabkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara keseluruhan. Pada triwulan II naik sebesar Rp339,887 triliun, yang didorong oleh perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipengaruhi oleh pergeseran masa panen. Sedangkan pada triwulan III dan IV masing-masing sebesar Rp350,827 triliun dan Rp343,123 triliun. Rp341,805 triliun pada triwulan I tahun 2020, kemudian turun menjadi Rp324,714 triliun pada triwulan II, pandemic Covid-19 membuat hampir seluruh lapangan usaha di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan terutama sector industri pengolahan dan perdagangan. Kemudian pada triwulan III dan IV cenderung naik pada angka Rp344,114 triliun dan Rp337,966 triliun. Tahun 2021 PDRB ADHB terus mengalami tren yang positif hingga sampai triwulan IV sebesar Rp364,347 triliun, hal tersebut didorong oleh pelonggaran PPKM dan peningkatan permintaan pada periode Nataru, serta didorong oleh insentif pemerintah berupa relaksasi PPnBM kendaraan bermotor dan PPN yang berdampak terhadap perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor dan properti.

4.2.3. Investasi

Perkembangan sektor ekonomi tidak dapat lepas dari nilai investasi yang ditanamkan pada sektor tersebut. Investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dan secara berkelanjutan akan mendorong proses ekonomi. Adapun perkembangan realisasi penanaman modal (PMA+PMDN) di Jawa Tengah Tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Realisasi Investasi (dalam triliun rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
2014	5,17	2,72	4,38	6,32	18,59
2015	6,92	5,83	4,77	8,52	26,04
2016	8,35	4,47	8,79	16,57	38,18
2017	12,27	9,08	11,69	18,50	51,54

2018	16,10	11,57	14,30	17,30	59,27
2019	21,40	14,70	11,14	12,26	59,50
2020	19,25	8,57	9,71	12,71	50,24
2021	12,26	13,03	12,90	14,36	52,55

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan realisasi investasi PMA+PMDN di Jawa Tengah selama delapan tahun terakhir (2014-2021) terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2019, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 realisasi investasi di Jawa Tengah sebesar Rp18,59 triliun dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp59,50 triliun, dimana pada tahun 2019 diperoleh PMA sebesar Rp40,85 triliun, dengan lima sector dominan meliputi sector listrik, gas dan air, industry barang dari kulit dan alas kaki, industry kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, industry tekstil, serta industry makanan. sedangkan PMDN sebesar 18,65 triliun dengan realisasi tertinggi ditempati Kabupaten Cilacap.

Realisasi investasi pada tahun 2020 justru mengalami penurun pada angka 50,24 triliun. Penurunan tersebut diduga karena adanya perlambatan perekonomian global, penundaan rencana kegiatan investasi akibat dari dampak covid-19 dan kendala-kendala internal perusahaan. Walaupun tahun 2021 pandemi covid-19 masih menjadi penghambat jalannya investasi yang masuk, dikarenakan adanya sejumlah pembatasan terutama untuk PMA, namun realisasi investasi Jawa Tengah naik sebesar 4,6% dari tahun 2020. Selain itu pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai Provinsi terbaik Nasional terkait pelayanan investasi tahun 2021 oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

4.2.4. Inflasi

Inflasi merupakan proses naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus. Inflasi juga merupakan masalah ekonomi makro yang jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, yang nantinya akan memperburuk kinerja perekonomian sebuah Negara. Perkembangan inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Inflasi (%) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2021

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2014	7,08	7,026	5,00	8,22
2015	5,69	6,15	5,78	2,73
2016	4,21	2,95	2,72	2,36
2017	3,30	4,61	3,58	3,71
2018	3,39	2,72	2,79	2,82
2019	1,82	2,52	3,13	2,80
2020	3,25	2,48	1,46	1,55
2021	1,48	1,25	1,28	1,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Melihat tabel 4.4 kita ketahui bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 triwulan I sebesar 7,08%, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya inflasi pada triwulan ini terbilang lebih rendah. Hal tersebut disebabkan masih terjaganya pasokan bahan pangan, karena masuknya masa panen padi. Komoditas penyumbang terbesar inflasi berasal dari kelompok bahan makanan dan naiknya harga elpiji 12 kg. Inflasi pada triwulan II naik menjadi 7,26% , komoditas yang menyumbang besar inflasi berasal dari kelompok bahan makanan seperti telur dan daging ayam ras, bawang merah dan bawang putih, serta komoditas bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah. Sedangkan pada triwulan III inflasi Jawa Tengah turun di angka 5,00%, hal ini dikarenakan sudah hilangnya dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013. Namun pada triwulan IV inflasi kembali naik sebesar 8,22%, hal ini ditengarai dengan dampak kenaikan BBM pada bulan November 2014. Pada tahun 2015 kuartal I, inflasi Jawa Tengah sebesar 5,69% dan mengalami kenaikan pada kuartal II sebesar 6,15%. Sedangkan pada triwulan III dan IV inflasi mengalami penurunan yaitu pada angka 5,78% dan 2,73%.

Inflasi Jawa Tengah tercatat mengalami peningkatan pada triwulan I 2016 sebesar 4,21% hal tersebut dikarenakan oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan di tengah terbatasnya panen komoditas hortikultura. Pada triwulan II inflasi tercatat 2,95%, penurunan ini disebabkan oleh terkendalinya harga komoditas

dibulan Ramadhan. Pada triwulan III inflasi kembali turun sebesar 2,72%, penurunan ini didorong oleh tekanan *volatile food* yang terjaga, tekanan *administered prices* yang masih rendah serta tingkat inflasi inti yang cenderung stabil. Triwulan IV inflasi juga mengalami penurunan pada angka 2,36%. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 inflasi di Jawa Tengah meningkat sebesar 3,30% pada triwulan I dan 4,61% pada triwulan II. Sedangkan pada triwulan III inflasi Jawa Tengah mengalami penurunan pada angka 3,58% hal tersebut ditengarai dengan menurunnya bahan makanan pasca periode Idul Adha. Namun pada triwulan IV inflasi kembali naik sebesar 3,71%.

Triwulan I tahun 2018 inflasi Jawa Tengah terlihat sebesar 3,39%, dan mengalami penurunan sebesar 2,72% pada triwulan II, yang disebabkan penurunan harga komoditas barang dan jasa kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Akan tetapi, inflasi kembali naik pada triwulan III dan IV yaitu sebesar 2,79% dan 2,82%. Triwulan I 2019 inflasi tercatat sebesar 1,82%, dan terus mengalami kenaikan pada triwulan II & III sebesar 2,52% dan 3,13%. Pada triwulan IV inflasi turun menjadi 2,80%. Pada tahun 2020 triwulan I inflasi tercatat sebesar 3,25%, kemudian terus mengalami penurunan sampai triwulan III sebesar 1,46% hal tersebut dikarenakan terbatasnya permintaan dan konsumsi masyarakat sehingga mampu menjaga inflasi relative stabil. Sedangkan pada triwulan IV inflasi kembali naik 1,55%. Tahun 2021 tingkat inflasi di Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada angka 1,48% pada triwulan I, 1,25% pada triwulan II, 1,28% pada triwulan III, dan 1,70% pada triwulan IV. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2021 disebabkan oleh penurunan tekanan harga kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok informasi, komunikasi serta jasa keuangan. Selain itu juga dipicu oleh tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta mulai membaiknya perekonomian global.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

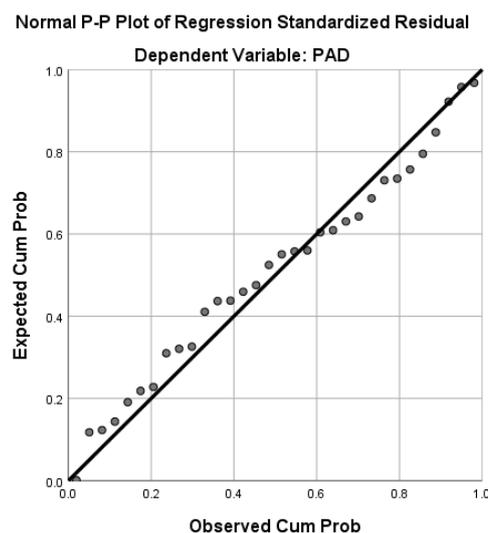
4.3.1.1. Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)

Uji normalitas digunakan untuk melihat sebaran data dalam variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak yang digunakan dalam penelitian adalah data yang mempunyai

distribusi normal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji *Normal Probability Plot*, dengan ketentuan jika data atau titik-titik mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika titik-titik tersebut tersebar atau terpisah dan tidak mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. berikut adalah hasil uji *normal probability plot* :

Gambar 4.1

Hasil Uji Normal Probability Plot



Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, kita dapat melihat bahwa titik-titik plot selalu mendekati dan mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan pedoman dalam pengambilan keputusan uji normalitas teknik *probability plot*, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Selain menggunakan *probability plot*, peneliti juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam menguji normalitas data. Dengan ketentuan jika sig. > 0,05 maka data distribusi normal, namun jika nilai sig. < 0.05 data tidak berdistribusi dengan normal. Adapun hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	685.84755106
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.078
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, sesuai ketentuan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan data memiliki distribusi normal. Sehingga model regresi dapat diteruskan untuk pengujian hipotesis.

4.3.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan terhadap data, dimana multikolinearitas terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* dalam model regresi. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10, berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, akan tetapi jika nilai *Tolerance* lebih kecil dari 0,10, maka terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi. Sedangkan jika nilai VIF < 10.000 berarti tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi, tetapi jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Adapun hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	.268	3.726
	Investasi	.534	1.873
	Inflasi	.300	3.338

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel output “Coefficients” pada bagian “Collinearity Statistics” dapat diketahui bahwa:

1. Variabel PDRB memiliki nilai Tolerance sebesar 0,268 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $3,726 < 10,00$.
2. Variabel Investasi memiliki nilai Tolerance sebesar 0,534 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $1,873 < 10,00$.
3. Variabel Inflasi memiliki nilai Tolerance sebesar 0,300 lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF sebesar $3.338 < 10,00$.

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen dalam model regresi.

4.3.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual dalam satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah Uji *Runs Test*. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat indikasi autokorelasi. Tetapi sebaliknya, jika Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	65.39142
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	16
Total Cases	32
Number of Runs	22
Z	1.617
Asymp. Sig. (2-tailed)	.106

a. Median

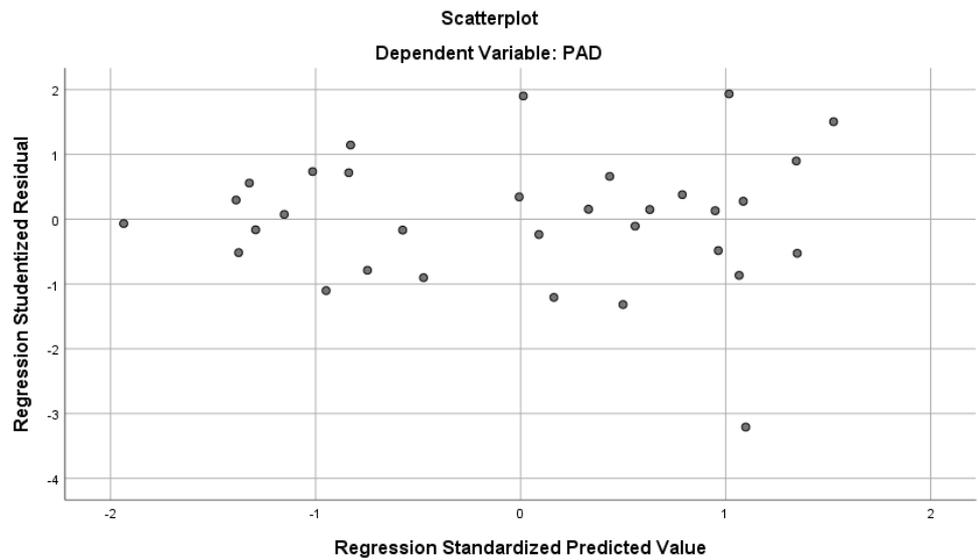
Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Dilihat dari tabel 4.7 diatas memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,106. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,106 > 0,05$ dengan demikian tidak terjadi gejala atau masalah autokorelasi dalam model regresi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan..

4.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Scatterplots*. Dengan ketentuan, data tidak ada masalah heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar nol, titik-titik data tidak hanya berkumpul di atas atau di bawah, dan titik-titik data tidak dapat membentuk pola yang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, atau dengan kata lain penyebaran titik-titik data tidak memiliki pola. Hasil dari uji Scatterplots adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Scatterplots



Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan output diatas dan mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan dalam uji *scatterplots* dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Selain uji *scatterplots*, peneliti juga menggunakan uji koefisien korelasi *spearman*, yaitu dengan menganalisis korelasi antara residual dengan masing-masing variabel independen. Jika nilai signifikannya $> 0,05$ (5%) maka tidak terjadi penyakit heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil pengolahan datanya :

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			PDRB	Investasi	Inflasi	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PDRB	Correlation Coefficient	1.000	.661	-.786	.039
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.831
		N	32	32	32	32
	Investasi	Correlation Coefficient	.661	1.000	-.549	-.001
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.001	.994
		N	32	32	32	32
	Inflasi	Correlation Coefficient	-.786	-.549	1.000	-.046
		Sig. (2-tailed)	.000	.001	.	.801
		N	32	32	32	32

Unstandar	Correlation Coefficient	.039	-.001	-.046	1.000
dized	Sig. (2-tailed)	.831	.994	.801	.
Residual	N	32	32	32	32

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Dari out put di atas menunjukkan bahwa:

1. PDRB dengan Unstandarzed Residual nilai signifikansinya adalah 0,831.
2. Investasi dengan Unstandarzed Residual nilai signifikansinya adalah 0,994.
3. Inflasi dengan Unstandarzed Residual nilai signifikansinya adalah 0,801.

Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada prinsipnya model regresi linier dapat berupa model yang parameter linier dan kuantitatifnya akan digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan jenis analisis data regresi sederhana berganda. Regresi berganda digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh PDRB, investasi, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.723	2.014		-.359	.722
	PDRB	.012	.006	.655	2.146	.041
	Investasi	-.002	.037	-.014	-.066	.948
	Inflasi	.055	.128	.123	.425	.674

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dengan memperhatikan koefisien masing-masing variabel, maka di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$= -0.723 + 0.12 \text{ PDRB} - 0.002 \text{ Investasi} + 0.055 \text{ Inflasi}$$

Hasil tersebut dapat di interpretasi bahwa :

1. Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi negatif, yaitu sebesar -0,723. Artinya apabila variabel bebas dianggap konstan, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,723 triliun.
2. Koefisien PDRB sebesar 0,12 maksudnya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 triliun, maka jumlah pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0.12 triliun dengan asumsi faktor lain konstan. Hasil penelitian dengan koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan yang positif antara PDRB dan PAD. Jika semakin besar PDRB di Provinsi Jawa Tengah maka semakin meningkat pendapatan asli daerahnya. Sebaliknya jika PDRB semakin kecil maka semakin menurun pula pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Koefisien investasi sebesar -0,002 maksudnya apabila terjadi kenaikan investasi sebesar 1 triliun, maka jumlah pendapatan asli daerah akan turun sebesar 0,002 triliun dengan asumsi faktor lain konstan. Hasil penelitian dengan koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan terjadi hubungan yang negatif antara investasi dan PAD. Jika investasi turun di Provinsi Jawa Tengah maka pendapatan asli daerahnya akan meningkat. Sebaliknya jika semakin besar investasi maka semakin menurun pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Koefisien inflasi sebesar 0,055 maksudnya apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 1%, maka jumlah pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0,055 persen dengan asumsi faktor lain konstan. Penelitian dengan hasil koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara inflasi dan PAD. Jika semakin besar inflasi di Provinsi Jawa Tengah maka semakin meningkat pendapatan asli daerahnya. Sebaliknya jika semakin kecil inflasi maka semakin menurun pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

4.3.3. Uji Hipotesis

4.3.3.1. Analisis Determinasi (R^2)

Dalam regresi linier berganda uji analisis determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kecilnya nilai R^2 menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Namun, jika nilainya mendekati satu, variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.10
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.225	.72116

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Investasi, PDRB

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” dapat kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,300. Hal ini menunjukkan besarnya kekuatan variabel independen dalam penelitian untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 30% . Angka tersebut mengisyaratkan bahwa variabel PDRB, investasi, dan inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel PAD sebesar 30%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar persamaan regresi ini.

4.3.3.2. Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen dalam model regresi secara simultan terhadap variabel dependen yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05 (5%). Standar pengujian uji F adalah, jika nilai signifikan F hitung kurang dari 0,05 (5%), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing variabel independen yang diteliti bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.239	3	2.080	3.999	.017 ^b
	Residual	14.562	28	.520		
	Total	20.801	31			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Investasi, PDRB

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0.017. karena nilai Sig. $0.017 < 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain variabel PDRB, investasi, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap variable PAD. Selain itu bisa juga dengan menentukan terlebih dahulu F tabel pada signifikansi 5% dengan rumus $(k ; n-k)$. Dimana k (jumlah variabel independen) dan n (jumlah sampel penelitian), maka menghasilkan angka 3;29. Angka tersebut menjadi acuan untu mencari nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistic. Dengan pengujian tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 3.999 sedangkan F tabel sebesar 2.93. karena nilai F hitung $3.999 > F$ tabel 2.93, maka disimpulkan bahwa variabel PDRB, investasi, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap variable Pendapatan Asli Daerah.

4.3.3.3. Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikan 0,05 (5%). dalam uji-t membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan setiap variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebelum menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak, terlebih dahulu ditentukan t tabel pada taraf signifikansi $5\%/2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan rumus $(a/2; n-k-1)$. Maka didapat nilai t tabel sebesar 2,048.

Tabel 4.12
 Hasil Uji Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.723	2.014		-.359	.722
	PDRB	.012	.006	.655	2.146	.041
	Investasi	-.002	.037	-.014	-.066	.948
	Inflasi	.055	.128	.123	.425	.674

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : SPSS 26, data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel output SPSS “Coefficients” diatas diketahui bahwa :

1. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel PDRB adalah sebesar 0.041. Karena nilai Sig. $0.041 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya ada pengaruh variabel PDRB terhadap variabel PAD. Selain itu nilai t hitung variabel PDRB sebesar 2.146. karena nilai t hitung $2.146 > t \text{ tabel } 2.048$, maka dapat dikatakan bahwa H1 diterima.
2. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Investasi adalah sebesar 0.948. Karena nilai Sig. $0.948 > \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel investasi terhadap variabel PAD. Selain itu nilai t hitung variabel investasi sebesar 0.066. karena nilai t hitung $0.066 < t \text{ tabel } 2.048$, maka dapat dikatakan bahwa H2 ditolak.
3. Nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel inflasi adalah sebesar 0.674. Karena nilai Sig. $0.674 > \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya tidak ada pengaruh variabel inflasi terhadap variabel PAD. Selain itu nilai t hitung variabel inflasi sebesar 0.425. karena nilai t hitung $0.425 < t \text{ tabel } 2.048$, maka dapat dikatakan bahwa H3 ditolak.

4.4. Interpretasi dan Pembahasan

4.4.1. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda pada variabel PDRB bertanda positif yaitu sebesar 0,12 artinya apabila terjadi kenaikan

PDRB sebesar 1 triliun, maka jumlah pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0.12 triliun dengan asumsi faktor lain konstan. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individu (uji t) pada variabel PDRB menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel yaitu sebesar $2.146 > 2.048$. Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel PDRB lebih kecil daripada probabilitas $0.041 < 0.05$. Dengan demikian dari hasil penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Penelitian ini menandakan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2021. Selama delapan tahun terakhir PDRB ADHB Jawa Tengah menunjukkan tren kenaikan yang positif kecuali pada tahun 2020. Hal ini diketahui bahwa industri pengolahan menduduki yang tertinggi dari tahun 2014 hingga 2021 dengan menyumbang sekitar 34% dari PDRB. Kenaikan tersebut berdampak terhadap pendapatan perkapita masyarakat daerah. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Michael Todaro bahwa tingginya pendapatan dapat mempengaruhi naiknya konsumsi perkapita, yang menyebabkan tingginya permintaan barang dan jasa. Pada akhirnya akan meningkatkan hasil pajak dan redistribusi daerah sebab kemampuan masyarakatnya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojul Munir (2021), yang menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Di Kabupaten Kudus. Selain itu, hal serupa juga dikemukakan oleh Dewi Ernita (2021), yang juga mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Kerinci.

4.4.2. Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Dalam penelitian ini, variabel investasi memiliki koefisien regresi berganda bernilai negatif sebesar 0,002, maksudnya jika terdapat kenaikan investasi sebesar 1 triliun, maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar 0,002 triliun dengan asumsi faktor lain bersifat konstan. Didukung uji dua sisi pada uji signifikansi parametrik individu (uji t) pada variabel investasi, menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $0,066 < 2,048$. Selain itu, nilai Sig. lebih besar dari probabilitas $0,948 > 0,05$. Oleh karena itu, sering disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Penelitian ini menandakan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2014-2021. Hasil ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Kaum Klasik yang beranggapan bahwa akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya memperluas pemakaian tenaga kerja dalam meningkatkan produktifitas. Adanya pembangunan ekonomi diprediksi akan menambah pendapatan. Sehingga secara tidak langsung dikatakan bahwa dengan melakukan investasi dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (DPMPTSP) menyebutkan bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah merupakan investasi padat modal, terutama pada sektor listrik, gas, air, mineral non logam, transportasi, konstruksi dan telekomunikasi. Misalnya saja pada tahun 2018 PMA yang berasal dari sector listrik gas dan air menyumbang sekitar Rp26,6 triliun sedangkan dari PMDN sektor penyumbang tertinggi adalah konstruksi sebesar Rp7,08 triliun. Kurangnya investasi di dalam sarana produksi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena faktor-faktor produksi belum dimanfaatkan secara penuh. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sedikit terhadap PAD di Jawa Tengah. Selain itu para Investor lebih tertarik menanamkan modalnya di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang diakibatkan lokasi tersebut dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang juga pasar produk yang potensial, hal tersebut terbukti pada tahun 2018 DKI Jakarta menempati posisi tertinggi realisasi PMDN dengan Rp49,09 triliun sedangkan Jawa Barat menempati posisi pertama untuk realisasi PMA sebesar Rp81,45 triliun. Dengan kurangnya penyerapan PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah berakibat penyerapan Tenaga kerja pun turut berkurang, dan akibatnya juga akan mempengaruhi pendapatan daerah karena tidak terjadi *full employment*.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojul Munir (2021), yang menyatakan bahwa variabel Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Di Kabupaten Kudus, hal tersebut dikarenakan kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Selain itu, nilai investasi yang masuk cukup fluktuatif sehingga kurang memberikan dampak yang nyata kepada PAD Kabupaten Kudus. Namun hal berbeda ditemukan oleh Reza Tianto (2022), yang mengungkapkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.

4.4.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan regresi linier berganda terhadap variabel inflasi memiliki tanda positif 0,055 artinya jika terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% maka jumlah pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,055 persen dengan faktor lain konstan. Didukung uji dua sisi pada uji signifikansi parametrik individu (uji t) pada variabel inflasi menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar $0,425 < 2,048$. selain itu, nilai Sig. lebih besar dari probabilitas $0,674 > 0,05$. Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Penelitian ini mencerminkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2021. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa Inflasi yang ringan justru dapat mendorong proses ekonomi. Hal ini terjadi karena inflasi dapat mendorong para pelaku usaha untuk lebih meningkatkan produktifitasnya. Karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha akan mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu, peningkatan produksi akan berdampak positif pada penyediaan lapangan kerja terbaru. Melihat inflasi yang terjadi di Jawa Tengah selama delapan tahun terakhir ini bisa dikategorikan sebagai inflasi ringan yaitu dibawah sepuluh persen. Namun pengaruh yang tidak signifikan inflasi terhadap PAD, menunjukkan bahwa ketika inflasi naik terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah, karena pajak daerah bersifat memaksa, meskipun pendapatan masyarakat berkurang karena kenaikan harga barang dan jasa, namun hal ini tidak berdampak pada pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun besarnya inflasi tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah.

Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ernita (2021), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci. Namun berbeda dengan hal tersebut, Dimas Priyono dan Herniwati Retno Handayani (2021), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati. Hal tersebut didasarkan pada tingkat inflasi yang besar sangat mempengaruhi kondisi ekonomi, jika tingkat inflasi tinggi maka akan mempengaruhi daya beli konsumen.

Inflasi juga dapat memengaruhi peningkatan PAD, yang penentuannya didasarkan pada omset penjualan, seperti pajak hotel dan pajak restoran.

4.4.4. Pengaruh PDRB, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model regresi linier berganda dimana menggunakan Uji Signifikan Regresi (Uji F) didapat hasil untuk F hitung sebesar 3.999 sedangkan F tabel sebesar 2.93. Artinya nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($3.999 > 2.93$). Maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu nilai Sig. yang diperoleh dibawah 0,05 yaitu sebesar 0.017. Kemudian berdasarkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,300. Hal tersebut menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen dalam penelitian untuk menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 30%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar persamaan regresi ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PDRB, investasi, dan inflasi secara simultan atau secara bersama-sama kurang lebih 30% berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2021.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik individual (uji t), dapat dinyatakan bahwa secara parsial variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan sebesar $0.041 < 0.05$ dan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel yaitu $2.146 > 2.048$. Selanjutnya variabel Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan sebesar $0.948 > 0.05$ dan nilai t hitung yang lebih kecil daripada t tabel yaitu $0.066 < 2.048$. Selain itu, secara parsial variabel Inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai t hitung yang lebih kecil daripada t tabel sebesar $0.425 < 2.048$ dan juga nilai Signifikan yang lebih besar daripada probabilitas sebesar $0.674 > 0.05$.
2. Sedangkan secara simultan atau bersama-sama variabel PDRB, Investasi, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan uji koefisien regresi (uji F) nilai F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu $3.999 > 2.930$. Dimana kurang lebih 30% seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2021, maka penulis meyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemberian bantuan berupa sarana prasarana kepada sektor-sektor yang termasuk dalam cakupan PDRB sehingga dapat menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk membuka lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah sehingga menciptakan objek pajak yang baru. Kemudian melakukan investasi yang lebih bervariasi khususnya pada sektor-sektor produksi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga harus dapat menjaga tingkat inflasi dibawah

10%, karena hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga para pengusaha akan meningkatkan produksinya, dan akan terbuka lapangan kerja baru. Sehingga akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Bagi investor atau pelaku industri diharapkan melakukan investasi di Jawa Tengah pada sektor-sektor yang belum banyak ditanami modal terutama sektor-sektor produksi, karena masih banyak potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat membantu program-program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, seperti patuh dalam membayar pajak dan mencoba menggali potensi yang ada di daerahnya.
4. Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk kegiatan belajar maupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya delapan tahun. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sejenis dengan variabel yang berbeda atau variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat dilihat bahwa selain PDRB, investasi, dan inflasi terdapat juga variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- 2022, Tim penyusunan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- Adnan, Nazeli. “Analisis Penghitungan Inflasi Berdasarkan Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan Periode 2001 - 2011.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 2 (2011): 141–149.
- Adriani, Evi, and Sri Indah Handayani. “Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Kabupaten Merangin.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 08 (2008): 1–6.
- Afiyah, Siti Nurul. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14.” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* 5, no. 2 (2011): 52–59.
- Anggraeni, Dina. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1274/1/DINA_ANGGRAENI-FEB.PDF.
- Anton Kisworo, Christian Octavian, Deded T. Prima, Muh. Fahrurrizki Aulia. *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah*. Edited by Wulan Agustina Rahayu. *Bank Indonesia*. Semarang: BI Provinsi Jawa Tengah, 2021. www.bi.go.id.
- Asmuruf, Makdalena, Vikie Rumate, and George Kawung. “Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatnasli Daerah (Pad)Di Kota Sorong.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 05 (2015): 732.
- Asteria, Beta. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.” *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 1 (2015): 51–61.
- Awaluddin. “Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (2017): 197.
- Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007.
- Bella, Cantika. “Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 4 (2014):

747–752.

- Cessario Sutrisno, Denny. “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah.” *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 435–445. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Fadilla. “Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam.” *Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 1–14.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Firman Sampurna, Agung, Pius Lustrilanang, and Bahrullah Akbar. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 & Laporan Hasil Reviue Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- Hardani, Auliya Nur Hikmatul, Helmina Ardiani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasanur, Dedek. “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Barat Selatan Provinsi Aceh).” Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2016.
- Hayu Wuranti, Diana Dwi Susanti, Metriana Jovanika. *Analisis ICOR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021.
- Hernawati. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Hibzon. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2007): 106–116.
- Hidayat, Arif Nur. “Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2007 – 2017.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Imaniar, Selli. “Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Tahun 2012-2016).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Juliansyah, Hijri, and Sulkadria. “Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue.” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 01, no. 02 (2018): 58–64. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami*. Edisi 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kertati, Indra, Lois Yulianto, Setyohadi Pratomo, Ulul Albab, Ibnu Hibban, and Fajar Hanung. *Jawa Tengah Membangun Tahun 2021*. Semarang: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2021.
- Lamandau, BPS Kabupaten. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab . Lamandau Tahun 2013 / 2014*. Lamandau: BAPPEDA Kabupaten Lamandau, 2014.
- Lim, Julnando, Alexander, Alvin N.C, and Vicky Him. “Peningkatan PDRB Kota Batam Pada Tahun 2019-2020.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 124, no. 3 (2014): 358–363. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2014143423>.
- Mafaza, Wildah, Yuniadi Mayowan, and Tri Henri Sasetiadi. “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11, no. 1 (2016): 1–4.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. 2019th ed. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Mudji, A, and W Taripar. “Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang.” *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2018): 35–46. <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/PANGRIPTA/article/download/8/5>.
- Muin, Rahmah. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Polewali Mandar.” *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/434>.
- Mulyani, Reni. “Inflasi Dan Cara Mengatasinya Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 267–278.
- Munir, Muhammad Sirojul. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2019).” Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021.
- Muslim, Caesar, Syahrir Mallongi, and Zainuddin Rahman. “Pengaruh PDRB , Jumlah Penduduk Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.” *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia* 2, no. 3 (2019): 57–65.
- Oktiani, Ariska. “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

- (PAD).” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 16–35.
- Panglipurningrum, Yofhi Septian, and Tri Nurdyastuti. “Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2010 – 2019.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 2 (2020): 211–222.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–373.
- Prasetyo, Rudi, and Sutjipto Ngumar. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 3 (2017): 854–869.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revi. Surabaya: Zifatma Publishing, 2008.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoritis Dan Empiris*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rahmayati, Anim, and Pertiwi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.” *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 2 (2018): 111–120.
- Ramdani, Dian, Darmansyah, and Nurmala Ahmar. “Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 04, no. 01 (2021): 27–39.
- Retnowati, Diah, and Harsuti. “Statistik Realisasi Investasi Di Jawa Tengah” (2017): 608–618.
- Rizaldi, Bayu, and Ahmad Guspul. “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karisedenan Kedu 2014-2018.” *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 3, no. 1 (2021): 8–15.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, and Imam Mukhlis. “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Studi Pembangunan* 8, no. 1 (2016): 9–16.
- Santosa, Agus Budi. “Analisis Inflasi Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017* (2017): 445–452.
- Santoso, Singgih. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Silvia, Ririn Bella. “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.” Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Sukanto, Grevy Rahmawati. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Jumlah Penduduk Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Empiris Pada

- Kabupaten/Kota Di Propinsi Pulau Jawa Tahun 2013).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Suryani, Yosi, and Rudy Rinaldy. “Perkembangan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018.” *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 11, no. 2 (2019): 361–374.
- Syahrullah, Dio. “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-20112.” Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- Tianto, Reza. “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2022): 113–124.
- Utami, Tini. “Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi.” *Majalah Ilmiah Gema Maritim* 13, no. 1 (2011): 8–12.
- Utari, G.A. Diah, Retni Cristina, and Sudiro Pambudi. “Inflasi Di Indonesia : Karakteristik Dan Pengendaliannya.” *Bank Indonesia Institute* 23, no. 23 (2015): 1–64.
- Wahyuningtyas, Rosita, Agus Rusgiyono, and Yuciana Wilandari. “Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010).” *Jurnal Gaussian* 2 (2013): 219–228. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>.
- Yudiana, I Wayan, I Gede Aryawan, and I Gusti Ayu Athina Wulandari. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Tabungan Dan Inflasi Terhadap Simpanan Masyarakat Di Bank Umum Provinsi Bali.” *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 (2019): 72–83.

Lampiran 1

Riwayat Hidup



Nama : Mudrik Syahrullah

NIM : 1805026028

Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 06 Januari 2000

Alamat : Jl. Prapanca, RT/RW 09/03, Ds.Tanjunganyar, Kec. Gajah, Kab. Demak

E-Mail : Syahrullahm61@gmail.com

No. Telp : 085293451060

Pendidikan Formal

1. SDN Tanjunganyar 2 (2007-2012)
2. MTS Nurul Huda Jati Medini (2012-2015)
3. MAK Al-Irsyad Gajah (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa Invest
2. KSEI Forshei
3. Generasi Bank Indonesia UIN Walisongo 2020

Lampiran 2

Distribusi Nilai F Tabel dengan Taraf Signifikansi 0,05 %

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran 3

Distribusi Nilai t Tabel

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005